

LAPORAN TAHUNAN PPID BISIP 2024



LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN 2024



BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2024 sesuai dengan rencana sebagaimana telah ditugaskan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024 sebagaimana juga telah dilakukan perubahan penetapan Surat Keputusan tersebut pada tanggal 8 April 2024 dalam Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 92/Kpts/HM.130/H.1.1/04/2024, dikarenakan adanya pergantian Kepala Subbag Tata Usaha.

Pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi merupakan bagian dari tugas utama Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) dan memberi peran BISIP sebagai 'front office' BSIP. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 adalah penting sebagaimana institusi publik adalah bagian dari pelayan masyarakat yang bertugas memberikan informasi-informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon. Sedangkan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana ketentuan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Tim PPID di BISIP yang terus secara aktif membantu terlaksananya implementasi PPID di tahun 2024. Semoga dengan penyusunan Laporan Tahunan ini akan tergambarkan apa yang menjadi titik perubahan dan pengembangan di periode implementasi KIP di tahun 2024 selain juga untuk penyempurnaan implementasi pelayanan ke depannya.



Bogor, 10 Januari 2025

Kepala Balai,

Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.

NIP.197406192001122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	4
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI DI BISIP	6
2.1. Rekapitulasi Permohonan	6
2.2. Waktu pelayanan informasi publik	6
2.3. Jumlah permohonan berdasarkan usia	7
2.4. Jumlah permohonan berdasarkan kategori pekerjaan.....	7
2.5. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis kelamin	8
2.6. Rekapitulasi pemohon berdasarkan kategori kelompok	8
2.7. Motto dan maklumat pelayanan PPID	9
2.8. Pengelolaan Informasi Publik BISIP	10
2.9. Sarana dan Prasarana	21
2.1. Sumber Daya Manusia.....	25
2.1. Anggaran	26
BAB III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	27
3.1. Menyusun Tim Pelaksana PPID Tahun 2024	27
3.2. Menyusun Daftar Informasi Publik Tahun 2024.....	28
3.3. Menyusun Rencana Aksi Implementasi Kegiatan PPID Tahun 2024	28
3.3.1. Menyusun Motto Pelayanan dan Pola Standar Perilaku Pelayanan	28
3.3.2. Menyusun Penayangan Agenda Kegiatan BISIP di Website.....	29
3.4. Rekapitulasi Permohonan.....	30
3.6. Mekanisme Pelayanan Permohonan Informasi	30
3.7. Inovasi Pengelolaan Pelayanan	32
3.8. Hasil Tindak Lanjut Pengelolaan Informasi Publik BISIP	33
BAB IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	34
BAB V. RENCANA TINDAK LANJUT	35
BAB VI. PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi pemohon berdasarkan usia Tahun 2024	7
Tabel 2. Rekapitulasi pemohon berdasarkan pekerjaan tahun 2024	7
Tabel 3. Rekapitulasi pemohon berdasarkan jenis kelamin tahun 2024.....	8
Tabel 4. Rekapitulasi pemohon berdasarkan kategori kelompok tahun 2024	8
Tabel 5. Perbandingan Visi dan Misi sebelum dan setelah Penetapan Renstra BISIP	9
Tabel 6. Rekapitulasi pelayanan informasi melalui produksi pemberitaan dan infografis media sosial Triwulan I, II, dan III 2024	19
Tabel 7. Pelaksana PPID di BISIP Tahun 2024.....	26
Tabel 8. Perbandingan Analisis Data Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024	29
Tabel 9. Rekapitulasi pelayanan informasi publik tahun 2024	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Maklumat Pelayanan BISIP Tahun 2024	10
Gambar 2.	Koordinasi Internal PPID	11
Gambar 3.	Pembinaan dan Monev Pengelolaan PPID	12
Gambar 4.	Buku saku NAS-IB untuk panduan penyimpanan file kinerja staf BISIP	12
Gambar 5.	Buku profil Lembaga berhuruf braile dan leaflet BISIP	13
Gambar 6.	Video Juru Bahasa Isyarat (JBI) ke dalam Video Profil BSIP dan BISIP	13
Gambar 7.	Tren pengguna layanan website BISIP	13
Gambar 8.	Produksi sebagian poster dan informasi dan pemasangannya	14
Gambar 9.	Penandatanganan komitmen KIP dan Konsolidasi KIP lingkup BSIP di Yogyakarta	14
Gambar 10.	Upload LHKPN dan Keterlibatan Kepala Balai dalam Sosialisasi Pemingkatan KIP 2024	15
Gambar 11.	Pemeliharaan counter layanan PPID	16
Gambar 12.	Pengumuman BISIP sebagai Balai Informatif, September 2024	16
Gambar 13.	Grafik reposting program utama Kementan di Medsos BISIP 2024	17
Gambar 14.	Video profil pelaksanaan KIP di BISIP	17
Gambar 15.	Pelaksanaan interview dan Presentasi Kinerja PPID BISIP 2024	18
Gambar 16.	Tren Pengguna Layanan Website BISIP, Oktober 2024	18
Gambar 17.	Produksi video profil pelisensi	19
Gambar 18.	Hasil pemeringkatan KIP lingkup Kementan tahun 2024	20
Gambar 19.	Hasil Penilaian Pemingkatan KIP Tahap Validasi dan Wawancara	20
Gambar 20.	Anugerah KIP lingkup Kementan tahun 2024	21
Gambar 21.	Kondisi pemeliharaan Layanan Informasi	21
Gambar 22.	Fasilitas Pendukung Layanan Informasi dan Budaya Kerja	22
Gambar 23.	Meja Resepsionis, Kotak Kepuasan Pengunjung dan Desktop Penerima Tamu	22
Gambar 24.	Poster Informasi SNI hasil BSIP	22
Gambar 25.	Kursi Roda untuk Difabel	23
Gambar 26.	Informasi Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul	23
Gambar 27.	Ruang penerima tamu Layanan Informasi	24
Gambar 28.	Meja Resepsionis, Kotak kepuasan pengunjung dan Desktop Penerimaan Tamu	24
Gambar 29.	Kursi Roda untuk Difabel	24
Gambar 30.	Perbaikan Jalur Disabilitas menjadi permanen dan landai dilengkapi <i>handrail</i>	25
Gambar 31.	Distribusi Responden SKM BISIP Triwulanan Tahun 2024	29
Gambar 32.	Tampilan penayangan agenda kegiatan BISIP di website BISIP	30
Gambar 33.	Prosedur Permohonan Informasi	31
Gambar 34.	Layanan BISIP pada linktr.ee/bisip.kementan	32
Gambar 35.	Ruang permohonan informasi di website www.bisip.bsip.pertanian.go.id	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK PPID BISIP tahun 2024.....	37
Lampiran 2. SK BISIP Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) BISIP tahun 2024	41
Lampiran 3. SK Kepala BISIP No. 92 tentang Perubahan SK No. 14 tentang Pelaksana PPID BISIP tahun 2024	48
Lampiran 4. Rincian Permohonan Informasi Tahun 2024.....	54
Lampiran 5. E-Monev KIP BISIP 2024.....	67

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 Tahun 2008 di Indonesia, secara garis besar implikasinya melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara negara sebagai Badan Publik dan masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik. UU KIP ini menjamin masyarakat atau publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, dalam upaya berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Implikasi yang dipandang sangat penting dengan adanya penerapan UU KIP ini bahwa daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat. Hal tersebut sejalan dengan peran masyarakat sebagai pengawas dan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan informasi publik. Apabila suatu saat terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan informasi publik, maka akan banyak pula pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan informasi publik tersebut.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, juga merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan UU KIP. Hal tersebut dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan turut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sejalan dengan UU KIP kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP ini mengamanatkan, semua badan publik di negara Republik Indonesia untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) paling lambat pada Agustus 2011. Sesuai dengan PP No. 61 tersebut, Kementerian Pertanian juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian pada 31 Mei 2011 diikuti dengan penetapan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian. Saat itu untuk PPID Pelaksana Eselon I tingkat Badan Litbang Pertanian dijabat oleh Kepala Bagian Kerjasama, Hukum, Organisasi, Tatalaksana dan Humas. Selanjutnya keputusan tersebut diturunkan dengan Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/II/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang menetapkan para Kepala Bidang KSPHP (Kerja Sama dan Pengelolaan Hasil Penelitian) di tingkat Eselon II dan Kepala Seksi Jasa Penelitian maupun Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian di tingkat Eselon III untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana maupun PPID Pelaksana UPT.

Seiring dengan kebutuhan dilakukan perubahan ketentuan di tingkat Kementerian dari yang semula Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 diubah dengan Permentan 25/Permentan/HM.130/5/2016 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada tanggal 20 Mei 2016 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 3 Juni 2016.

Demikian pula pada prosesnya di tahun 2022 dan 2023 terjadi perubahan baik untuk perubahan organisasi di Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian pada 21 September 2022 dan selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Sedangkan untuk penunjukan Pejabat Pelaksana PPID Utama ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Sehingga pada saat ini PPID Pelaksana Eselon I melekat langsung pada Eselon I dan Pembantu Pelaksana PPID langsung melekat pada Pejabat Eselon II dan III di masing-masing Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 September 2023.

Selanjutnya untuk di tingkat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian ditetapkan juga Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024 dan dilakukan perubahan atas mutasi Kepala Subbag Tata Usaha di bulan April 2024 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 92/Kpts/HM.130/H.1.1/04/2024 tanggal 8 April 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) Tahun 2024.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan tahunan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) di tahun 2024 untuk Balai Informasi dan Standar Instrumen Pertanian adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPID Pembantu Pelaksana di tingkat Eselon III di BSIP dalam hal melakukan pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- b. Memperoleh kepercayaan dalam hal penyelenggaraan pelayanan informasi publik kepada masyarakat pengguna layanan; dan

- c. Mengukur kinerja pelayanan, dalam hal ini pelayanan informasi sebagaimana Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) memiliki tugas pelayanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian sebagaimana ditetapkan pada Pasal 156 Permentan Nomor 13 Tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Publik (PPID) BISIP di tahun 2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

12. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
15. Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
16. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
17. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024;
18. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 92/Kpts/HM.130/H.1.1/04/2024 tanggal 8 April 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024.

1.4. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan PPID merupakan gerbang utama unit pelayanan informasi dalam menyelenggarakan dan memberikan informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon atau pengguna layanan. Khusus untuk informasi yang tidak dikecualikan dapat diakses oleh masyarakat sedangkan untuk informasi publik yang dikecualikan, maka perlu ditetapkan dalam peraturan khusus yang akan diperkuat dengan Keputusan Menteri. Demikian pula halnya untuk informasi yang dikecualikan di Kementerian Pertanian, maka informasi yang dikecualikan di Kementerian Pertanian diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Infomasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi non-pemerintah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Selaras dengan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, BISIP sebagai Badan Publik, menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik sebagai implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sebagaimana Permentan ini mengimplementasikan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pertanian.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara, dan/atau penyelenggara dan Penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan pelayanan informasi publik sebagaimana di BISIP menangani informasi yang berkaitan dengan Aset Tak Berwujud (ATB) Bernilai Kekayaan Intelektual berupa paten, hak cipta, rahasia dagang, SK Menteri tentang galur ternak, dan sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), maka secara spesifik kebijakan berkaitan dengan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) di BISIP perlu terus digali mekanisme perlindungan yang memadai dan tidak dalam intensi menutupi dan tetap menunjang keterbukaan informasi publik sebagaimana BISIP adalah instansi pelayanan publik.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI DI BISIP

Pelayanan informasi publik di BISIP dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dengan tekad mendorong pada perubahan kinerja Balai menjadi Balai Informatif. Terutama sejak masih menjadi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian belum terlalu memperhatikan adanya kebutuhan untuk meraih predikat sebagai Balai yang informatif, sebagaimana di tahun 2023-2024 telah dikategorisasi oleh PPID Utama Kementerian Pertanian. Dengan pemeringkatan yang terbawah sebagai 'belum informatif', 'cukup informatif', dan 'informatif', selain juga pemberian peringkat mulai dari Peringkat 1, 2, 3, Harapan 1, 2, 3, dan Juara Umum.

Landasan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, sebagaimana Undang-undang adalah kekuatan hukum yang paling hakiki dan tertinggi. Oleh karenanya, implementasinya menjadi pengukuhan utama dalam penerapannya di setiap lembaga legislative selain juga saat ini Balai Pengelola Alih Teknologi telah berubah menjadi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) dengan mandat tugas utama adalah pelaksanaan pelayanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian.

Sehubungan dengan perubahan kondisi ruang lingkup dari tugas dan fungsi tersebut maka pelayanan di BISIP dilakukan banyak penyesuaian sebagaimana dituliskan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 pada pasal 155 s/d 160 mengenai BISIP, Kepmentan 279/2023 untuk tugas Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standadisasi Instrumen Pertanian dan tugas tambahan BISIP dalam Kepmentan 488 Tahun 2023. BISIP sebagai lembaga pemerintah memiliki amanat yang sejalan dengan UU 14 Tahun 2008. Artinya bahwa dalam implementasi pelayanan utama di BISIP juga terimplementasi amanat tugas BISIP selaku institusi publik yang melaksanakan amanat undang-undang. Masyarakat berhak melakukan pengawasan dan kontrol sosial atas apa yang dilaksanakan BISIP. Kontrol masyarakat sangat diperlukan guna mengawasi kinerja instansi pemerintah, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan demokratis serta mempercepat perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1. Rekapitulasi Permohonan

Rekapitulasi permohonan informasi publik yang terlayani di BISIP dapat dilihat seperti yang tertera dalam Lampiran 1 dengan tabulasi informatif dan dapat menjadi data dasar pengelolaan rekapitulasi permohonan tahunan untuk dapat dianalisis dan dilakukan pengamatan sifat dan karakteristik pemohon informasi di BISIP di tahun 2024 untuk pembandingan di tahun 2023 atau tahun mendatang 2025 dalam kerangka perbaikan.

2.2. Waktu pelayanan informasi publik

Penentuan Pelayanan Informasi Publik diatur bahwa waktu Pelayanan informasi publik di BISIP menyesuaikan dengan jam layanan kantor yaitu dari Senin s/d Kamis dimulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB diselingi dengan waktu istirahat di pukul 12.00 – 13.00 WIB sedangkan untuk hari Jumát dimulai pukul 07.30 s/d hingga 11.30 WIB diselingi waktu istirahat pukul 11.30 – 13.30 dan dilanjutkan pukul 13.30 - 16.30 WIB. Dan komitmen pelaksanaan sesuai waktu ini dilakukan untuk konsistensi dalam memberikan pelayanan.

2.3. Jumlah permohonan berdasarkan usia

Rekapitulasi pemohon berdasarkan usia disepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1. Dengan dominansi pemohon berada pada usia dewasa 41-50 tahun sebanyak 45 orang dan puncak jumlah pemohon berada di bulan Juni sebanyak 20 orang pemohon.

Tabel 1. Rekapitulasi pemohon berdasarkan usia Tahun 2024

Bulan	Jumlah Pemohon (orang)	Kategori Usia				
		<20	21-30	31-40	41-50	>50
Januari	5	-	1	1	3	0
Februari	8	-	3	3	1	1
Maret	8	-	1	3	1	3
April	9	-	1	3	2	3
Mei	17	-	1	7	4	5
Juni	20	-	4	2	9	5
Juli	13	-	3	2	3	5
Agustus	7	-	-	4	3	-
September	12	-	-	8	4	-
Oktober	10	-	1	3	5	1
November	11	-	1	3	2	5
Desember	11	-	-	1	8	2
Total	131	-	16	40	45	30

Sumber: Data diolah BISIP 2024

2.4. Jumlah permohonan berdasarkan kategori pekerjaan

Rekapitulasi pemohon berdasarkan pekerjaan sebagaimana pengelompokan PNS, Swasta, Umum, Pelajar dan lainnya di BISIP di Tahun 2024 dapat dilihat seperti yang tertera dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi pemohon berdasarkan pekerjaan tahun 2024

Bulan	Jumlah Pemohon (orang)	Kategori Pekerjaan				
		PNS	Swasta	Umum	Pelajar	Lainnya
Januari	5	-	1	1	3	-
Februari	8	7	-	1	-	-
Maret	8	5	3	-	-	-
April	9	6	3	-	-	-
Mei	17	12	5	-	-	-
Juni	20	18	2	-	-	-
Juli	13	4	8	-	1	-
Agustus	7	4	3	-	-	-
September	12	8	4	-	-	-
Oktober	10	5	5	-	-	-
November	11	4	7	-	-	-
Desember	11	3	8	-	-	-
Total	131	76	49	2	4	0

Sumber: Data diolah BISIP 2024

2.5. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis kelamin

Rekapitulasi pemohon berdasarkan jenis kelamin di BISIP di periode bulan Januari hingga Desember tahun 2024 dapat dilihat seperti yang tertera dalam Tabel 3 dengan dominasi pemohon informasi ada pada jenis kelamin laki-laki, dan permohonan tertinggi berada di triwulan kedua dan triwulan keempat.

Tabel 3. Rekapitulasi pemohon berdasarkan jenis kelamin tahun 2024

Bulan	Jumlah Pemohon (orang)	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Januari	5	3	2
Februari	8	3	5
Maret	8	4	4
April	9	7	2
Mei	17	10	7
Juni	20	10	10
Juli	13	9	4
Agustus	7	4	3
September	12	6	6
Oktober	10	10	-
November	11	9	2
Desember	11	9	2
Total	131	84	47

Sumber: Data diolah BISIP 2024

2.6. Rekapitulasi pemohon berdasarkan kategori kelompok

Rekapitulasi pemohon berdasarkan kategori pengelompokan informasi (pertanian, anggaran dan keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan, pengadaan barang dan jasa, HKI dan Lisensi, dan lainnya) di BISIP di Tahun 2024 dapat dilihat seperti yang tertera dalam Tabel 4 dengan pertanyaan kategori tertinggi pada kelompok kategori lainnya, kemudian kategori HKI dan lisensi, kategori pengadaan barang dan jasa, dan anggaran dan keuangan.

Tabel 4. Rekapitulasi pemohon berdasarkan kategori kelompok tahun 2024

Bulan	Jumlah Pemohon (orang)	Kategori Pengelompokan						
		Pertanian	Anggaran dan Keuangan	Kepegawaian	Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Pengadaan Barang dan Jasa	HKI dan Lisensi	Lainnya
Januari	5	-	1	-	-	-	4	-
Februari	8	1	1	-	-	-	3	2
Maret	8	-	-	-	-	-	5	3
April	9	1	-	-	-	3	3	2
Mei	17	-	-	-	-	1	11	5
Juni	20	-	13	-	-	-	2	5
Juli	13	-	-	-	1	3	2	7
Agustus	7	-	-	-	-	-	2	5
September	12	-	-	-	-	3	1	8
Oktober	10	-	1	-	1	2	2	4
November	11	-	-	-	1	4	1	5
Desember	11	-	-	-	-	6	-	5
Total	131	2	16	0	3	22	36	51

Sumber: Data diolah BISIP 2024

2.7. Motto dan maklumat pelayan PPID

Motto dan maklumat yang diterapkan dalam pelayan informasi publik BISIP sebagaimana telah ditetapkan untuk pelayan di BSIP selain juga dilakukan penetapan pelayan hasil dengar pendapat publik (*public hearing*) BISIP sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 76/Kpts/HK.130/H.1.1/11/2023 tentang Motto Pelayan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023 pada tanggal 14 November 2023, yaitu:

SMILE, LISTEN, AND ACTION

- S = Sistematis
- M = Managable and Negotiable
- I = Integrated Lintas Sektor
- L = Legal
- E = Efektif, Efisien, dan Ekonomis

Smile ini juga akan terwujud dalam sikap dan perilaku dalam memberikan pelayan dari petugas layan dengan mengedepankan Smile, Listen, and Action sebagai komitmen untuk menciptakan suasana bersahaja dan bergembira dalam memberikan layan.

Sedangkan untuk visi dan misi mengalami penyesuaian sebagaimana hasil penetapan Tim Penyusun Renstra Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian 2023-2024 sebagaimana SK yang ditetapkan sebagai dokumen kinerja Balai sesuai Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 118/Kpts/RC.020/H.1.1/05/2024 tentang Rencana Strategis Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023-2024 dan mengubahnya kembali sebagaimana perubahan indikator pada Perjanjian Kinerja (PK) dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) kepada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per triwulan IV Tahun 2024. Penetapan tersebut diperbaharui dalam Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 133/Kpts/RC.020/H.1.1/12/2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 118/Kpts/RC.020/H.1.1/05/2024 tentang Rencana Strategis Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2023-2024 tanggal 20 November 2024. Adapun perbandingan visi dan misi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 guna memberikan perbandingannya.

Tabel 5. Perbandingan Visi dan Misi sebelum dan setelah Penetapan Renstra BISIP

	Sebelum Penetapan Renstra	Setelah Penetapan Renstra BISIP
Visi	<i>Terwujudnya pengelolaan layan dokumentasi dan informasi Publik yang professional mendukung pembangunan Pertanian.</i>	Menjadi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian terdepan dalam memberikan layan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumrn pertanian yang berorientasi pada layan prima sesuai dengan motto pelayan BISIP yaitu SMILE (Terukur, Manageable, Integrated lintas Institusi, Legal, dan Efisien, Efektif dan Ekonomis).
Misi	1 <i>Meningkatkan kualitas pelayan publik dibidang layan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian dan HKI Balitbangtan;</i>	1 <i>Melaksanakan reformasi birokrasi menuju birokrasi berintegritas dan berkinerja tinggi menunjang pengelolaan hasil standar instrumen pertanian yang mendorong pemanfaatan yang optimal</i>

	Sebelum Penetapan Renstra	Setelah Penetapan Renstra BISIP
	2 Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab.	atas hasil standar dan Aset Tak Berwujud; 2 Melaksanakan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berkualitas mendukung peningkatan kinerja BSIP yang efisien, efektif, dan bernilai ekonomis.
Motto	Melayani dengan cepat, akurat, dan bertanggung jawab.	SMILE (Terukur, Manageable, Integrated lintas Institusi, Legal, dan Efisien, Efektif dan Ekonomis).

Sedangkan untuk maklumat layanan yang menjadi komitmen BISIP sepanjang tahun 2024, yaitu:

Dengan ini kami menyampaikan sanggup untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.



Gambar 1. Maklumat Pelayanan BISIP Tahun 2024

2.8. Pengelolaan Informasi Publik BISIP

Pelaksanaan pengelolaan informasi publik sebagaimana yang dikuasai sesuai dengan amanah Undang-Undang KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi oleh karenanya beberapa kegiatan dapat disampaikan dengan beberapa pencapaian dan menjadi upaya perbaikan pengelolaan, baik secara mandiri dan/atau secara terintegrasi dengan koordinasi BSIP selaku PPID Pelaksanan Eselon I. Berikut adalah kegiatan PPID BISIP tahun 2024 yang memiliki dampak, sesuai bulan berjalan, diantaranya:

1. Januari

Penyiapan regulasi dan kebijakan serta penetapan Tim yang berkaitan dengan PPID, berupa:

- a. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024, termasuk pembagian tugas dalam penyusunan laporan bulanan PPID;
- b. Penandatanganan Maklumat Pelayanan pada 11 Januari 2024;
- c. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 63/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Tim Pengelolaan Media Sosial pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- d. Koordinasi internal dalam penetapan Daftar Informasi Publik di BISIP Tahun 2024 dilaksanakan oleh Timja PHSIP dan Tim PPID yang telah dibentuk;



Gambar 2. Koordinasi Internal PPID

2. Februari

Penyiapan regulasi dan kebijakan serta perencanaan kegiatan yang menunjang, berupa:

- a. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 23/Kpts/HM.130/H.1.1/02/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024 dengan usulan terkait dengan:

Huruf C, HKI dengan penambahan point 7, yaitu: Informasi paten yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan masih dalam proses pemeriksaan deskripsi paten serta dalam proses memperoleh sertifikat paten oleh Ditjen KI, KemenKUMHAM dan BSIP, dimana pendanaan anggaran saat memperoleh paten ini berasal dari Kementerian Pertanian (cq. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian);

- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monev Keterbukaan Informasi Publik di BISIP dengan LO PPID Utama Kementan. Pembinaan terkait dengan implementasi yang lebih sesuai sebagaimana diperoleh dari hasil evaluasi PPID Utama Sekretariat Jenderal, dilakukan koordinasi dan pembinaan pada 6 Februari 2024 di BISIP. Biro Humas dan Informasi Publik selaku LO PPID Utama Kementerian Pertanian sekaligus mengupas tuntas hal-hal yang harus diperbaiki oleh BISIP dalam ruang penyesuaian SAQ dan beberapa penyediaan informasi. Hasil kegiatan sebagaimana diberitakan melalui website BISIP dan Media Sosial yang tersedia (Gambar 3).



Gambar 3. Pembinaan dan Monev Pengelolaan PPID

- c. Pengelolaan informasi dan dokumentasi akan sangat membutuhkan inovasi dalam pelaksanaannya saat ini untuk kemudahan akses data dan informasi yang dikuasai diinternal BISIP telah disiapkan sistem penyimpanan file Bersama dalam Network Attached Storage – Informasi Balai (NASIB) dengan esensi bahwa dengan memanfaatkan NAS maka kemudahan dalam pengelolaan informasi dan data ditingkat Balai dapat dilakukan dengan mudah. Inovasi pemanfaatan NAS dalam membantu memperoleh informasi bagi Tim PPID dapat menjadi kemudahan dalam memenuhi permintaan informasi di BISIP.



Gambar 4. Buku saku NAS-IB untuk panduan penyimpanan file kinerja staf BISIP

- d. Koordinasi mitigasi kebutuhan 4 SOP Penunjang dalam pelayanan informasi, yaitu: 1) SOP Layanan Informasi; 2) SOP Layanan Informasi secara daring; 3) SOP Media Sosial; dan SOP Website.

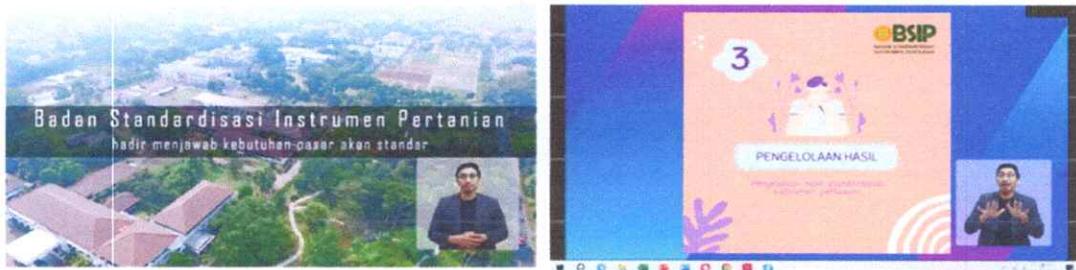
3. Maret

Kegiatan di bulan Maret dalam kaitan dengan PPID dilakukan berupa kegiatan koordinasi internal mendukung penilaian mandiri Zona Integritas dan mengacu pada notulen Pelaporan Progress Pelaksanaan Survei SPAK, SPKP dan Penilaian Mandiri Zona Integritas Lingkup BSIP, perlu dicek kembali evidence persiapan penilaian Mandiri ZI periode 2023 sampai dengan Maret 2024, dan komponen Pelayanan Publik salah satunya ditunjang dari tugas utama BISIP terkait pelayanan informasi dan pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian.

- Melakukan pembuatan sarana informasi untuk penyandang disabilitas berupa buku profil BISIP berhuruf braille dan penyediaan leaflet informasi Balai (Gambar 5);
- Menyematkan video Juru Bahasa Isyarat (JBI) ke dalam Video Profil BSIP dan BISIP



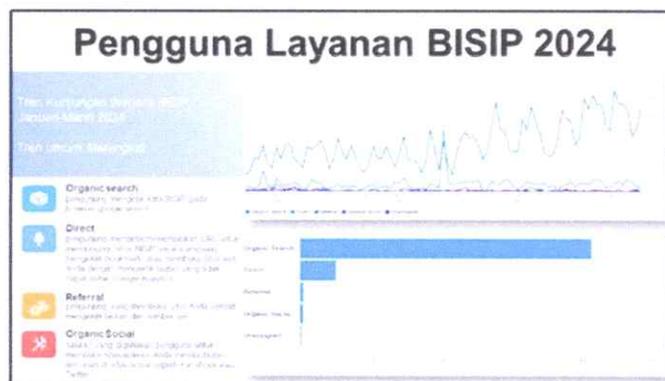
Gambar 5. Buku profil Lembaga berhuruf braille dan leaflet BISIP



Gambar 6. Video Juru Bahasa Isyarat (JBI) ke dalam Video Profil BSIP dan BISIP

4. April

Di periode bulan April 2024 dilakukan evaluasi terhadap akses website oleh publik melalui monitoring fasilitas *google analytics* untuk periode Januari-Maret 2024 menunjukkan tren akses publik terhadap website BISIP secara umum meningkat (Gambar 7).



Gambar 7. Tren pengguna layanan website BISIP

5. Mei

Kegiatan pengelolaan di PPID BISIP di bulan Mei, dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pelaksanaan kelengkapan informasi di tempat-tempat strategis di Balai disiapkan poster dan informasi pendukung terkait dengan SNI yang telah dihasilkan BSIP. Diantaranya produksi poster dilakukan terkait juga dengan dukungan mengimplementasikan komitmen Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), komitmen pelayanan tidak berbiaya, dan juga etika budaya malu serta budaya ASN BerAkhlik.



Gambar 8. Produksi sebagian poster dan informasi dan pemasangannya

- b. Penandatanganan Pembaharuan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada 17 Mei 2024 (Gambar 9) sebagaimana telah dilakukan pelantikan pejabat baru Subbag Tata Usaha BISIP pada 2 April 2024;



Gambar 9. Penandatanganan komitmen KIP dan Konsolidasi KIP lingkup BSIP di Yogyakarta

- c. Keikutsertaan BISIP dalam pelaksanaan evaluasi dan konsolidasi pengelolaan pelayanan informasi publik lingkup BSIP, Yogyakarta, 21-23 Mei 2024.

6. Juni

BISIP secara berkelanjutan melengkapi dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak yang tersedia secara fisik maupun digital yang di upload pada website BISIP dengan memanfaatkan website di alamat <http://bisip.bsip.pertanian.go.id> dan portal PPID BISIP dengan alamat <https://bisip-bsip-ppid.pertanian.go.id/>, hal ini dilaksanakan guna meningkatkan nilai implementasi keterbukaan informasi publik terutama menunjang predikat Balai yang informatif jelang periode penilaian dan kelengkapan SAQ.

Dokumen informasi publik yang dilakukan update di bulan Juni oleh PPID BISIP yakni:

- a. menyediakan dokumen Daftar Informasi Publik Tahun 2024 yang telah disampaikan ke PPID Utama dan juga telah diupload di website BISIP dengan link <https://bisip.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/daftar-informasi-publik>.
- b. Penyusunan laporan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk triwulan I tahun 2024 telah terpenuhi dimana diperoleh nilai IKM lingkup BISIP yakni 83,67 dengan kategori mutu Baik (B) dan untuk IKM Triwulan II Tahun 2024 diperoleh nilai 85,71 dengan kategori mutu Baik (B) meningkat dari Triwulan I Tahun 2024. Keduanya dapat diakses melalui link <https://bisip.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/indeks-kepuasan-masyarakat>.
- c. Melakukan upload informasi publik berkaitan dengan LHKPN periode 2023 usai di verifikasi oleh KPK dapat diakses melalui link <https://bisip.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lhkpn> (Gambar 10).



Gambar 10. Upload LHKPN dan Keterlibatan Kepala Balai dalam Sosialisasi Pemingkatan KIP 2024

7. Juli

Di bulan Juli BISIP melalui surat Nomor B-1695/HM.130/H.1.1/07/2024 tanggal 23 Juli mengusulkan 2 orang petugas PPID BISIP untuk dapat masuk dalam nominasi Seleksi Petugas PPID Terbaik Tahun 2024 lingkup Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Nama : Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum.
NIP : 198112222011011004
Pangkat/Gol : Penata/IIIc
Jabatan : Pustakawan Muda
2. Nama : Rani Fitria, S.E.
NIP : 198307132023212026
Pangkat/Gol : IX
Jabatan : Pranata Humas Pertama

Namun demikian, keduanya belum berhasil lolos dalam seleksi tersebut.

8. Agustus

Pelaksanaan kegiatan PPID di periode Agustus dilaksanakan dalam rangka:

- mendukung kesiapan evaluasi dan monitoring SAQ KIP termasuk penyiapan seluruh bukti di portal PPID selain juga dilakukan pemeliharaan ruang counter layanan PPID (Gambar 11).



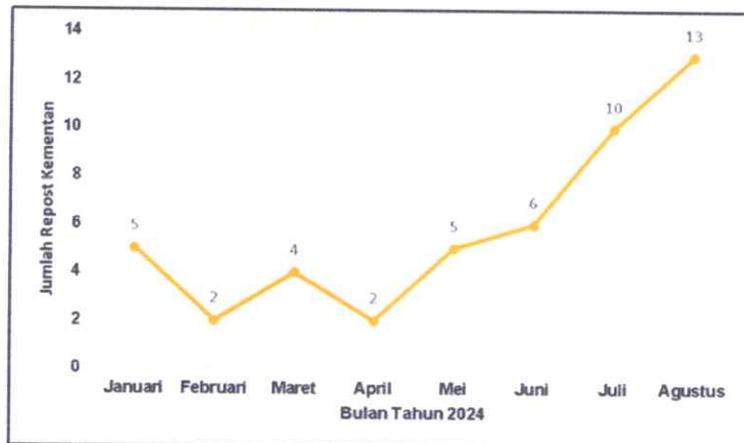
Gambar 11. Pemeliharaan counter layanan PPID

- Sebagaimana surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor B-2523/HM.130/A/08/2024 pada tanggal 16 Agustus 2024 tentang Hasil Penilaian Tahap Pertama Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2024, BISIP mendapatkan peringkat dengan kategori unit kerja eselon III yang informatif dengan nilai 90 (Gambar 12). Hasil pemeringkatan ini dilanjutkan dengan tahapan monev pemeringkatan selanjutnya melalui validasi dan wawancara. Dari capaian progres yang dicapai ini membuktikan bahwa BISIP mulai dari pimpinan hingga pelaksana, berkomitmen penuh dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori	Peringkat
21	Balai Perikanan (Jember) (Rogot)	90,0	III	90,0
22	Unit Kegiatan Mahasiswa (Kendari)	88,5	III	91,0
23	Balai Perikanan (Tegal) (Tegal)	88,0	III	91,0
24	Balai Perikanan (Samarinda)	87,0	III	91,0
25	Balai Perikanan (Makassar)	86,0	III	91,0
26	Balai Perikanan (Kendari)	85,0	III	90,0
27	Balai Perikanan (Makassar)	84,0	III	90,0
28	Balai Perikanan (Makassar)	83,0	III	90,0
29	Balai Perikanan (Makassar)	82,0	III	90,0
30	Balai Perikanan (Makassar)	81,0	III	90,0
31	Balai Perikanan (Makassar)	80,0	III	90,0
32	Balai Perikanan (Makassar)	79,0	III	90,0
33	Balai Perikanan (Makassar)	78,0	III	90,0
34	Balai Perikanan (Makassar)	77,0	III	90,0
35	Balai Perikanan (Makassar)	76,0	III	90,0
36	Balai Perikanan (Makassar)	75,0	III	90,0
37	Balai Perikanan (Makassar)	74,0	III	90,0
38	Balai Perikanan (Makassar)	73,0	III	90,0
39	Balai Perikanan (Makassar)	72,0	III	90,0
40	Balai Perikanan (Makassar)	71,0	III	90,0
41	Balai Perikanan (Makassar)	70,0	III	90,0
42	Balai Perikanan (Makassar)	69,0	III	90,0
43	Balai Perikanan (Makassar)	68,0	III	90,0
44	Balai Perikanan (Makassar)	67,0	III	90,0
45	Balai Perikanan (Makassar)	66,0	III	90,0
46	Balai Perikanan (Makassar)	65,0	III	90,0
47	Balai Perikanan (Makassar)	64,0	III	90,0
48	Balai Perikanan (Makassar)	63,0	III	90,0
49	Balai Perikanan (Makassar)	62,0	III	90,0
50	Balai Perikanan (Makassar)	61,0	III	90,0
51	Balai Perikanan (Makassar)	60,0	III	90,0
52	Balai Perikanan (Makassar)	59,0	III	90,0
53	Balai Perikanan (Makassar)	58,0	III	90,0
54	Balai Perikanan (Makassar)	57,0	III	90,0
55	Balai Perikanan (Makassar)	56,0	III	90,0
56	Balai Perikanan (Makassar)	55,0	III	90,0
57	Balai Perikanan (Makassar)	54,0	III	90,0
58	Balai Perikanan (Makassar)	53,0	III	90,0
59	Balai Perikanan (Makassar)	52,0	III	90,0
60	Balai Perikanan (Makassar)	51,0	III	90,0
61	Balai Perikanan (Makassar)	50,0	III	90,0
62	Balai Perikanan (Makassar)	49,0	III	90,0
63	Balai Perikanan (Makassar)	48,0	III	90,0
64	Balai Perikanan (Makassar)	47,0	III	90,0
65	Balai Perikanan (Makassar)	46,0	III	90,0
66	Balai Perikanan (Makassar)	45,0	III	90,0
67	Balai Perikanan (Makassar)	44,0	III	90,0
68	Balai Perikanan (Makassar)	43,0	III	90,0
69	Balai Perikanan (Makassar)	42,0	III	90,0
70	Balai Perikanan (Makassar)	41,0	III	90,0
71	Balai Perikanan (Makassar)	40,0	III	90,0
72	Balai Perikanan (Makassar)	39,0	III	90,0
73	Balai Perikanan (Makassar)	38,0	III	90,0
74	Balai Perikanan (Makassar)	37,0	III	90,0
75	Balai Perikanan (Makassar)	36,0	III	90,0
76	Balai Perikanan (Makassar)	35,0	III	90,0
77	Balai Perikanan (Makassar)	34,0	III	90,0
78	Balai Perikanan (Makassar)	33,0	III	90,0
79	Balai Perikanan (Makassar)	32,0	III	90,0
80	Balai Perikanan (Makassar)	31,0	III	90,0
81	Balai Perikanan (Makassar)	30,0	III	90,0
82	Balai Perikanan (Makassar)	29,0	III	90,0
83	Balai Perikanan (Makassar)	28,0	III	90,0
84	Balai Perikanan (Makassar)	27,0	III	90,0
85	Balai Perikanan (Makassar)	26,0	III	90,0
86	Balai Perikanan (Makassar)	25,0	III	90,0
87	Balai Perikanan (Makassar)	24,0	III	90,0
88	Balai Perikanan (Makassar)	23,0	III	90,0
89	Balai Perikanan (Makassar)	22,0	III	90,0
90	Balai Perikanan (Makassar)	21,0	III	90,0
91	Balai Perikanan (Makassar)	20,0	III	90,0
92	Balai Perikanan (Makassar)	19,0	III	90,0
93	Balai Perikanan (Makassar)	18,0	III	90,0
94	Balai Perikanan (Makassar)	17,0	III	90,0
95	Balai Perikanan (Makassar)	16,0	III	90,0
96	Balai Perikanan (Makassar)	15,0	III	90,0
97	Balai Perikanan (Makassar)	14,0	III	90,0
98	Balai Perikanan (Makassar)	13,0	III	90,0
99	Balai Perikanan (Makassar)	12,0	III	90,0
100	Balai Perikanan (Makassar)	11,0	III	90,0

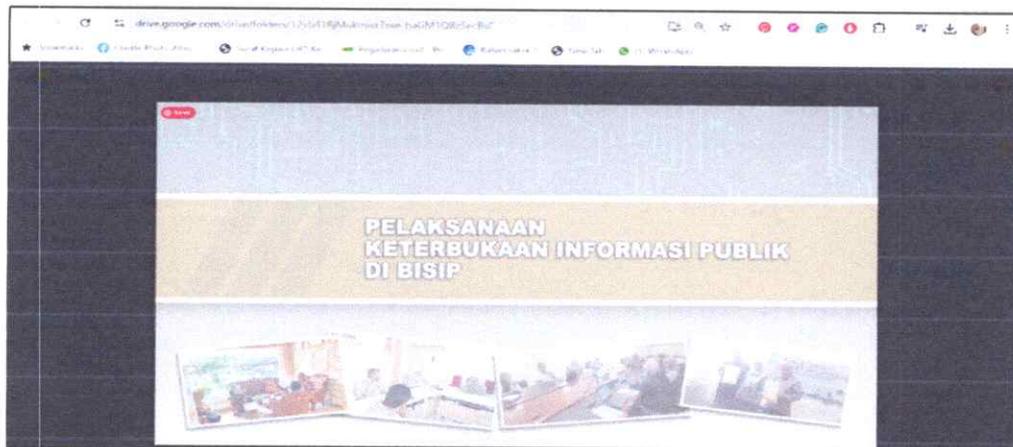
Gambar 12. Pengumuman BISIP sebagai Balai Informatif, September 2024

- Melakukan reposting atas 3 program utama Kementan berkaitan dengan Pompanisasi, Perluasan Areal Tanam (PAT), dan Optimalisasi Lahan Rawa (OPLA) dengan mengusung tagar #PompanisasiJadiSolusi dan #JagaPanganBiarAman sesuai edaran Sekjen pada surat No. B-2549/HM.130/A/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Instruksi Penderasan Informasi Kementerian Pertanian dan akumulasi laporan melalui g-drive di BISIP <https://forms.gle/87C9Vbc7Bqep4NZC9> dengan hasil rekap pada Gambar 13.



Gambar 13. Grafik reposting program utama Kementan di Medsos BISIP 2024

- d. Penyediaan video profil pelaksanaan PPID di BISIP mendukung evaluasi kinerja pelayanan PPID di periode monev oleh Komisi Informasi Pusat (Gambar 14).



Gambar 14. Video profil pelaksanaan KIP di BISIP

- e. Menyiapkan media publikasi yang memuat artikel ilmiah populer. Publikasi tersebut adalah Warta Agrostandar yang dikelola secara OJS dengan ruang lingkup memuat informasi seputar agrostandar serta informasi yang merupakan informasi hasil pemikiran yang mendukung kebijakan pengembangan instrumen di bidang pertanian.

9. September

Pelaksanaan kegiatan PPID di periode September dilaksanakan dalam rangka:

- a. Proses interview dan presentasi kinerja pengelolaan PPID dihadapan Penilai dari Komisi Informasi Publik yang dilakukan secara langsung di Ruang Pertemuan PVTTP dan Kepala BISIP menyampaikan hal yang spesifik dan hanya dilakukan oleh BISIP terkait dengan data dan informasi ATB (Gambar 15).



Gambar 15. Pelaksanaan interview dan Presentasi Kinerja PPID BISIP 2024

10. Oktober

Pelaksanaan kegiatan PPID di periode Oktober diantaranya, yaitu:

- a. Evaluasi dan analisa terhadap tren akses publik terhadap website BISIP pada periode Oktober 2024 sebagai triwulan ke-4 di tahun 2024, dimana di triwulan ke-4 ini secara umum meningkat, namun aksesnya cukup berfluktuasi (Gambar 16).



Gambar 16. Tren Pengguna Layanan Website BISIP, Oktober 2024

- b. Dilakukan evaluasi atas penerbitan informasi yang disebarakan melalui media sosialisasi
Pencermatan atas kebutuhan evaluasi ini memberikan esensi dan upaya penyebarluasan informasi sebagaimana tugas utama BISIP dalam memberikan pelayanan informasi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi pelayanan informasi melalui produksi pemberitaan dan infografis media sosial Triwulan I, II, dan III 2024

Bulan	Media Sosial (Jumlah Produksi dan Jangkauan)												Website (Jumlah)
	Instagram			Facebook			Tiktok			X			
	P	R	L	P	R	L	P	R	L	P	R	L	
Januari	17	11	1049	17	11	470	12	3	283	17	11	32	8
Februari	18	9	701	18	9	345	11	3	210	18	9	14	8
Maret	17	10	951	17	10	331	15	-	205	16	10	26	9
April	18	8	1036	18	8	453	14	2	223	18	8	24	6
Mei	14	13	995	14	13	374	14	6	281	15	12	13	5
Juni	19	9	838	19	9	391	19	9	270	20	9	7	5
Juli	11	14	738	11	14	345	11	13	495	11	14	3	18
Agustus	12	19	1098	12	19	547	12	18	596	13	19	52	11
September	14	22	1821	13	24	953	14	21	1758	13	21	58	21
Total	140	115	9227	139	117	4209	122	75	4321	141	113	229	91

Keterangan P : Produksi sendiri, R : Reposting, L : Like

11. November

Pelaksanaan kegiatan PPID di periode November diantaranya berupa penyusunan dan produksi video profil pelisensi khususnya berdasarkan kondisi atas kemungkinan para mitra menjadi calon penerap standar dari setiap produk standar yang dihasilkan BSIP. Proses penyusunan video ini guna memberikan fasilitasi atas pelaksanaan tugas utama BISIP yang berkaitan dengan pengelolaan hasil standardisasi instrumen pertanian;



Gambar 17. Produksi video profil pelisensi

12. Desember

Diperiode kegiatan PPID akhir tahun 2024, di bulan Desember dilaksanakan kegiatan:

- a. Pada periode Desember 2024 menunjukkan tren akses publik terhadap website BISIP secara umum meningkat, namun, akses *google analytics* di bulan Desember mengalami kendala data tidak terbaca. Sebagaimana surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor B-2523/HM.130/A/08/2024 pada tanggal 16 Agustus 2024 tentang Hasil Penilaian Tahap Pertama Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2024, BISIP mendapatkan peringkat 41 dengan kategori unit kerja eselon III yang informatif dengan nilai 90 (Gambar 18) dan rincian penilaian terdapat pada Lampiran 5.



Gambar 18. Hasil pemeringkatan KIP lingkup Kementan tahun 2024

- b. Hasil pemeringkatan ini dilanjutkan dengan tahapan monev pemeringkatan melalui validasi dan wawancara. Hasil pemeringkatan tahap 2 tersebut, BISIP memperoleh nilai total 89,3944 (Gambar 19). Hasil monitoring dan evaluasi KIP ini kemudian menjadi dasar perbaikan lebih lanjut agar bisa membenahi dan meningkatkan pengelolaan KIP di BISIP.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik								
Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis				Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian				
Rekap Penilaian:								
Nilai SAQ	Nilai Web	Nilai Tahap I	Nilai Wawancara pimpinan	Nilai Inovasi pelayanan informasi	Nilai Validasi	Nilai Tahap II	Total	
91	86	90	87,31	87	100	88,486	89,3944	
Hasil Nilai SAQ		Hasil Nilai Web						

Gambar 19. Hasil Penilaian Pemeringkatan KIP Tahap Validasi dan Wawancara

Kemudian pada tanggal 06 Desember 2024, berdasarkan surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. B-4178/HM.130/A/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 dilaksanakan kegiatan koordinasi kehumasan dan anugerah keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian. BISIP menjadi salah satu satker yang menerima penghargaan tersebut dengan peringkat 22 sebagai satker informatif (Gambar 20). Dari capaian progres yang dicapai ini membuktikan bahwa BISIP mulai dari pimpinan hingga pelaksana, berkomitmen penuh dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

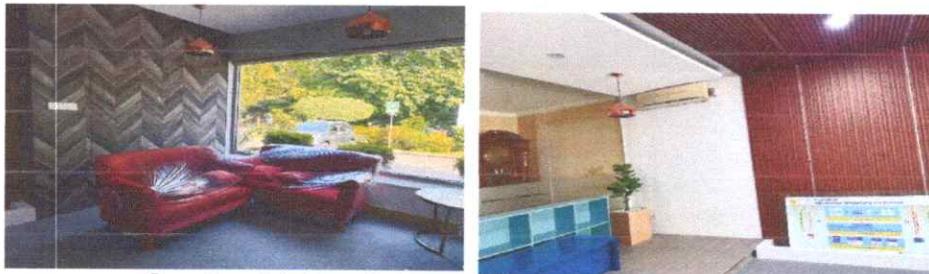


Gambar 20. Anugerah KIP lingkup Kementan tahun 2024

2.9. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian maka pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugasnya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang terus dilengkapi sebagaimana kebutuhan dan penganggaran yang mendukung, sejak Januari hingga Desember 2024, sebagai berikut:

1. 1 Unit PC;
2. 1 Unit Printer;
3. 1 Unit AC;
4. 1 Unit Handphone;
5. 1 Unit kotak saran pelayanan;
6. 2 Unit serta Kursi Tamu;
7. Formulir Layanan Informasi;
8. Ruang Pelayanan PPID dalam kondisi pemeliharaan;
9. Ruang Perpustakaan;
10. Media Cetak (Buletin, Monograf, Leaflet);
11. Penyediaan dokumen informasi untuk disabilitas;
12. Poster informasi denah tata ruang dengan titik evakuasinya;
13. Penyediaan poster informasi standar di beberapa lokasi strategis ruang kantor;
14. Jaringan internet wifi;
15. Sejumlah anggaran penunjang;
16. Petugas piket pelayanan PPID;
17. Kursi Roda;
18. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul; dan
19. Jalur Disabilitas.



Gambar 21. Kondisi pemeliharaan Layanan Informasi



Gambar 22. Fasilitas Pendukung Layanan Informasi dan Budaya Kerja



Gambar 23. Meja Resepsionis, Kotak Kepuasan Pengunjung dan Desktop Penerima Tamu



Gambar 24. Poster Informasi SNI hasil BSIP



Gambar 27. Ruang penerima tamu Layanan Informasi



Gambar 28. Meja Resepsionis, Kotak kepuasan pengunjung dan Desktop Penerimaan Tamu



Gambar 29. Kursi Roda untuk Difabel



Gambar 30. Perbaikan Jalur Disabilitas menjadi permanen dan landai dilengkapi *handrail*

Sarana lain terkait penyediaan informasi publik diperlukan juga struktur organisasi, dan SOP permohonan informasi publik mengacu kepada SOP PPID Kementan yang telah diupload ke website BISIP <https://bisip.bsip.pertanian.go.id/layanan/layanan-lainnya/ppid>

2.1. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian dibentuk susunan pelaksana PPID tahun 2024 sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024 (Lampiran 1) kemudian dikarenakan adanya mutasi Kepala Subbag Tata Usaha, kemudian dilakukan perubahan sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 92/Kpts/HM.130/H.1.1/04/2024 tanggal 8 April 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024 (Lampiran 2). Disebutkan dalam Keputusan tersebut bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan unit kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Sedangkan susunan Tim PPID di BISIP sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pelaksana PPID di BISIP Tahun 2024

No	N a m a	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si. NIP. 197406192001122001	IV/a	Kepala Balai
2	Kania Tresnawati, S.TP. NIP. 198011232005012001	III/c	Tim Kerja PHSIP
3	Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si. NIP. 197002092000031001	IV/a	Kepala Subbagian Tata Usaha
4	Miyike Triana, SP. NIP. 197205191998022003	IV/a	Pelaksana/Calon Arsiparis
5	Fenny Sumardiani, SH. NIP. 199208162015032001	III/b	Pelaksana/Kepegawaian
6	Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum NIP. 198112222011011004	III/b	Pelaksana/Pustakawan
7	Erwin Maulana, S. Kom. NIP. 198911082020121002	III/a	Pelaksana/Pranata Komputer
8	Morina Pasaribu, SP., M.Si. NIP. 198601022014032001	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
9	Rani Fitria, S.E NIP. 198307132023212026	III/a	Pelaksana/Pranata Humas
10	Ferry Tatilu	-	Pelaksana/PPNPN
	Pada 8 April 2024 diubah <u>Semula:</u> Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si. NIP. 197002092000031001	IV/a	Kepala Subbagian Tata Usaha
	<u>Menjadi:</u> Mulyawan, SE NIP 197602072007011001	III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha

2.1. Anggaran

Anggaran operasional untuk mendukung pengelolaan informasi publik Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian pada tahun 2024 sebagaimana juga di tahun 2023 juga dialokasikan pada kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal pada 2 kegiatan yang berjudul Layanan Hubungan Masyarakat dan Layanan Data dan Informasi dan dalam pelaksanaannya terkoordinasi melalui Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian dan pelaksana pelayanan adalah Subbag Tata Usaha dibantu dengan Tim pendukung substantif dari Tim Kerja PHSIP di sepanjang tahun 2024.

BAB III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mengelola informasi publik yang dikuasai oleh BISIP sesuai dengan UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagai perwujudan UU tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian dan telah diubah sebagaimana Permentan No. 25 tahun 2016.

BISIP secara berkelanjutan melengkapi dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak yang tersedia di tempat maupun digital yang diupload pada website BISIP dengan alamat ip <http://bisip.bsip.pertanian.go.id> dan portal PPID BISIP dengan alamat <https://bpatp-litbang-ppid.pertanian.go.id/> Sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, yaitu melaksanakan layanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian. BISIP telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Menyusun Tim Pelaksana PPID dalam Keputusan Kepala Balai;
2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan menetapkannya dalam Surat Keputusan Kepala Balai;
3. Menyusun rencana aksi implementasi kegiatan PPID tahun 2024;
4. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan hasil monev SAQ dengan LO PPID Utama Sekretariat Jenderal, Kementan; dan
5. Merekap permohonan informasi yang dilakukan selama tahun 2024 dalam beberapa kategorisasi pemohon informasi.

3.1. Menyusun Tim Pelaksana PPID Tahun 2024

Tim pelaksana PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai pada 29 Januari 2024 dan sejak awal disebutkan dimungkinkan untuk diubah dan diperbaiki. Oleh karenanya dengan adanya perubahan mutasi Kepala Subbag Tata Usaha maka dilakukan penyesuaian kembali untuk SK Tim PPID sebagaimana dilakukan pelantikan pada 2 April 2024 maka perubahan SK Pelaksana PPID diubah pada 8 April dan Penandatanganan Komitmen KIP kepada Kepala Subbag TU dilakukan pada 14 Mei 2024. Adapun SK tersebut yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 92/Kpts/HM.130/H.1.1/04/2024 tanggal 8 April 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024.

3.2. Menyusun Daftar Informasi Publik Tahun 2024

Mengelola informasi publik yang dikuasai oleh BISIP sesuai dengan UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) perlu ditetapkan terlebih dahulu informasi yang dikecualikan, sehingga dalam proses pelaksanaan pelayanan nanti dapat dihindari kesalahan dalam pemberian layanan informasi, sehingga kemudian ditetapkan oleh Kepala BISIP sebagaimana Surat Keputusan Nomor 23/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024. Adapun daftar informasi yang dikecualikan tersebut saat ini belum tersedia untuk lingkup BSIP.

Salah satu usulan dari BISIP sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas kepada Sekretaris Badan untuk usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dapat ditambahkan mengenai:

Huruf C, HKI dengan penambahan point 7, yaitu: Informasi paten yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan masih dalam proses pemeriksaan deskripsi paten serta dalam proses memperoleh sertifikat paten oleh Ditjen KI, KemenKUMHAM dan BSIP, dimana pendanaan anggaran saat memperoleh paten ini berasal dari Kementerian Pertanian (cq. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian);

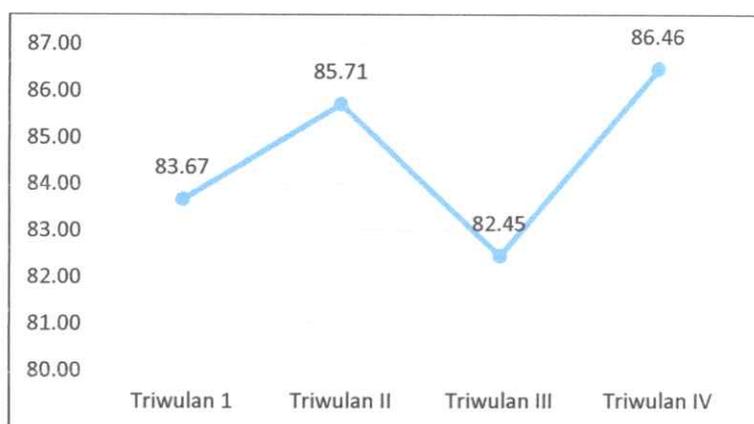
3.3. Menyusun Rencana Aksi Implementasi Kegiatan PPID Tahun 2024

3.3.1. Menyusun Motto Pelayanan dan Pola Standar Perilaku Pelayanan

Diperiode implementasi dari penetapan motto pelayanan SMILE disertai dengan sikap *smile, listen and action* saat ditetapkan pada 14 November 2023 maka di periode tahun 2024 kiranya dapat dicari dampak atas pola dan penerapan sikap pelayanan sesuai Motto SMILE, yang merupakan kepanjangan dari S-Sistematis dan Terstruktur; M-*Manageable/Negotiable*; I-*Integrated Collaborator*; L-*Legally Protected & Informative*; E-Efisien, Efektif, Ekonomis. Sedangkan perilaku standar dari pelayanan di BISIP sendiri yaitu *Smile, Listen, and Action* sebagaimana merupakan inti perilaku yang sudah mengakar di BISIP dari pola ramah, selalu tersenyum diawal saat menerima permohonan layanan, mendengarkan terlebih dahulu dari apa yang diinginkan pemohon, dan *action* atau aksi tindak lanjut sebagaimana permohonan.

Motto pelayanan yang diimplementasikan diperiode 2024 ini tercermin dari unsur pelayanan publik yang dimonitor secara berkala di dalam Laporan Zona Integritas dan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dalam laporan IKM tersebut terlihat bahwa unsur pelaksana cukup memuaskan disepanjang tahun 2024.

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat dengan jawaban dari 376 responden menunjukkan bahwa nilai IKM BISIP Tahun 2024 Bulan Januari – Desember 2024 berada dalam interval mutu layanan pada kategori **B Baik** meskipun menunjukkan tren nilai IKM berfluktuatif (Gambar 31 dan Tabel 8).



Gambar 31. Distribusi Responden SKM BISIP Triwulanan Tahun 2024

Tabel 8. Perbandingan Analisis Data Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024

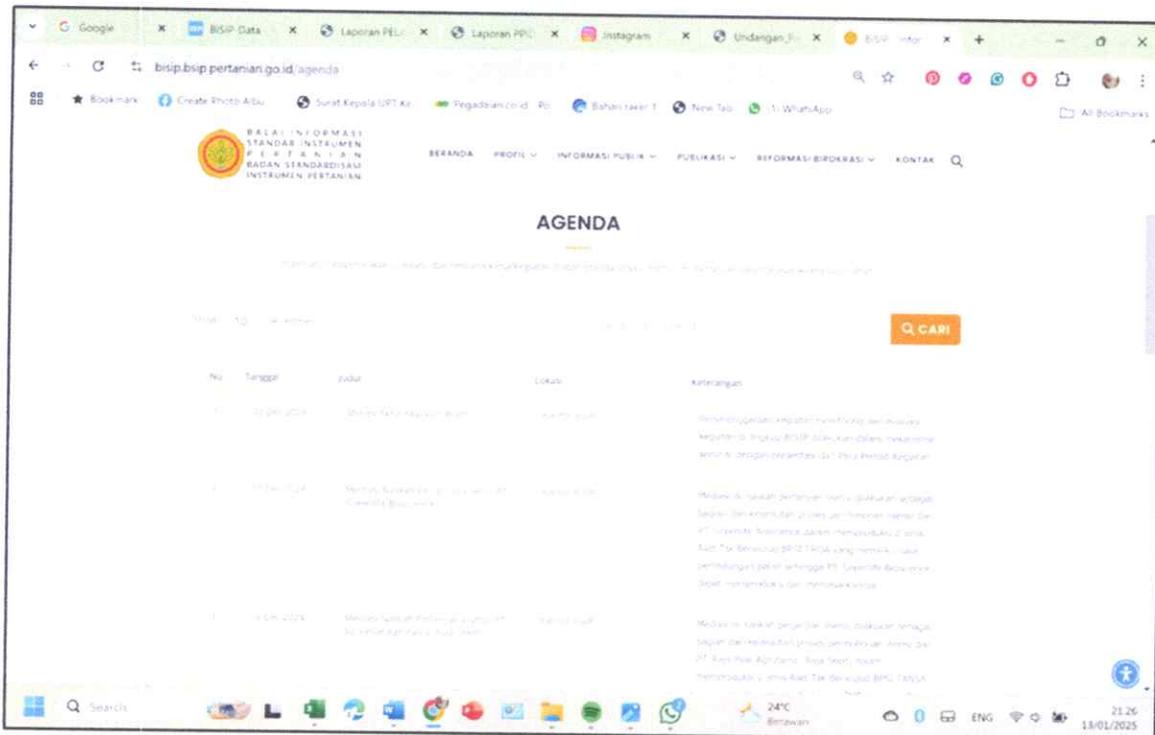
No	Unsur Pelayanan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Nilai Rata-rata	%						
U1	Persyaratan	3.32	82.89	3.41	85.20	3.29	82.37	3.51	87.73
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.32	83.08	3.39	84.69	3.29	82.37	3.47	86.82
U3	Waktu Penyelesaian	3.34	83.46	3.45	86.22	3.29	82.37	3.44	85.91
U4	Biaya/Tarif	3.35	83.83	3.39	84.69	3.28	82.01	3.53	88.18
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.31	82.71	3.29	82.14	3.28	82.01	3.40	85.00
U6	Kompetensi Pelaksana	3.40	84.96	3.47	86.73	3.35	83.63	3.55	88.64
U7	Perilaku Pelaksana	3.47	86.65	3.65	91.33	3.39	84.71	3.49	87.27
U8	Sarana dan Prasarana	3.31	82.71	3.43	85.71	3.29	82.19	3.40	85.00
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.31	82.71	3.39	84.69	3.22	80.40	3.35	83.64
NRR Tertimbang Unsur		3.35	83,67	3.43	85,71	3.30	82.45	3.46	86.46

Sumber: Laporan IKM BISIP 2024

Analisis IKM dilakukan berdasarkan 9 unsur layanan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian. Hasilnya menunjukkan adanya unsur perilaku pelaksana (U7) dalam kategori baik sejak Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2024, bahkan di Triwulan ke-2 nilai unsur U7 paling tinggi dibandingkan unsur lainnya sebesar 3,65.

3.3.2. Menyusun Penayangan Agenda Kegiatan BISIP di Website

Agenda kegiatan di tahun 2024 tetap dilakukan update dalam bentuk keterbukaan informasi yang dapat dilihat melalui <https://bisip.bsip.pertanian.go.id/agenda> (Gambar 32).



Gambar 32. Tampilan penayangan agenda kegiatan BISIP di website BISIP

3.4. Rekapitulasi Permohonan

Rekapitulasi permohonan informasi publik yang terlayani di BISIP di periode Tahun 2024 dapat dilihat seperti yang tertera dalam Tabel 9 berikut sebagaimana pengelompokan permohonan pelayanan dan rincian dilampirkan pada Lampiran 5.

Tabel 9. Rekapitulasi pelayanan informasi publik tahun 2024

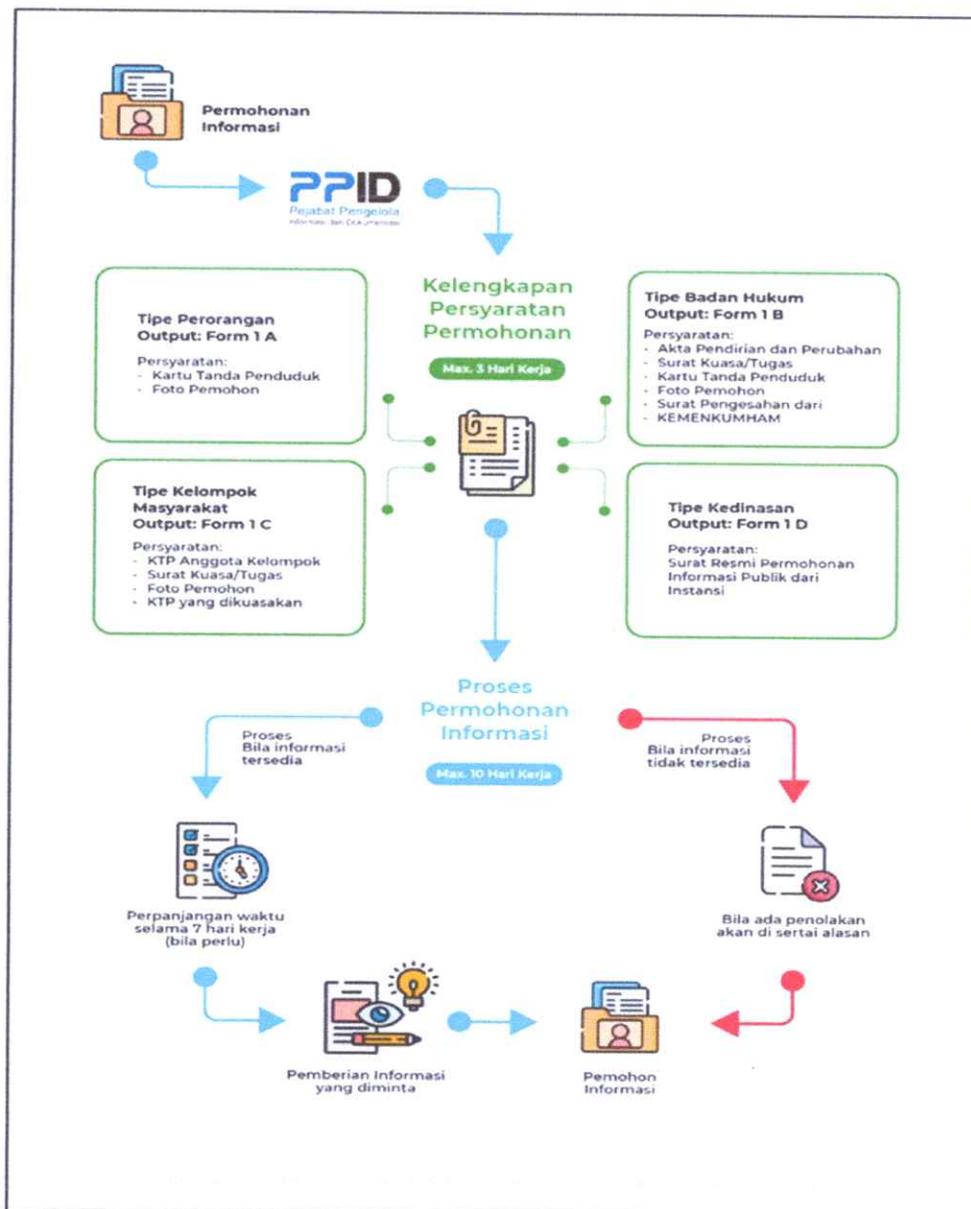
Jumlah Pemohon (orang)	Kategori Permohonan Informasi	
	Substantif (topik)	Pelayanan Umum
131	120	11

3.6. Mekanisme Pelayanan Permohonan Informasi

Mekanisme pelayanan permohonan informasi sebagaimana dijelaskan dalam Tata Cara Permohonan Informasi (Gambar 33) dengan langkah prosedur sebagai berikut:

- Langkah 1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon, serta melalui permohonan online melalui alamat <https://bpatp-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/user/register/portal>
- Langkah 2. Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.
- Langkah 3. Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

- Langkah 4. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.
- Langkah 5. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.
- Langkah 6. Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.
- Langkah 7. Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.



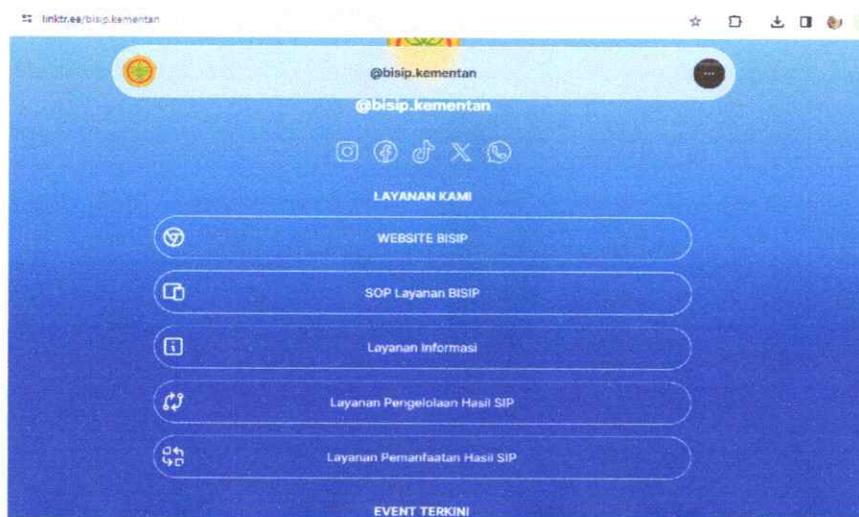
Gambar 33. Prosedur Permohonan Informasi

Sedangkan ketentuan Pelayanan Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut bahwa waktu Pelayanan informasi publik di BISIP menyesuaikan dengan jam

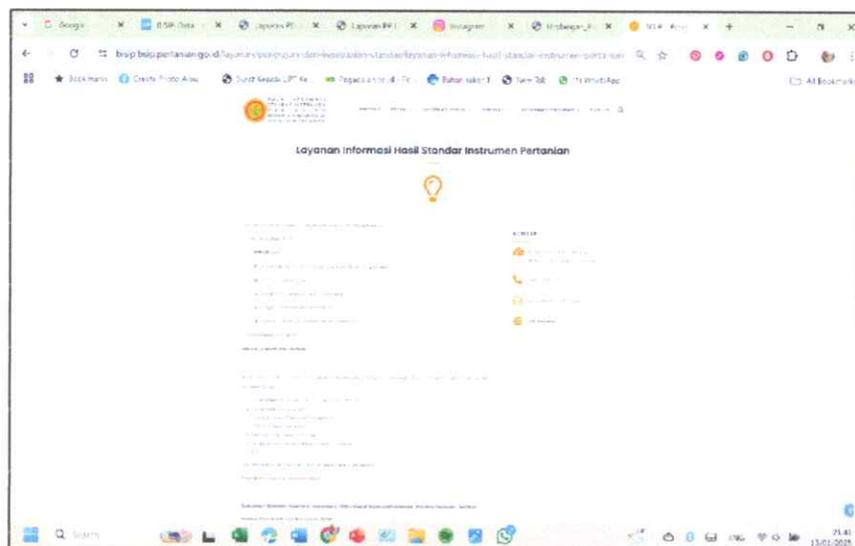
layanan kantor yaitu dari Senin s/d Kamis dimulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB diselingi dengan waktu istirahat di pukul 12.00 – 13.00 WIB sedangkan untuk hari Jumát dimulai pukul 07.30 s/d hingga 11.30 WIB diselingi waktu istirahat pukul 11.30 – 13.30 dan dilanjutkan pukul 13.30 - 16.30 WIB.

3.7. Inovasi Pengelolaan Pelayanan

Pengelolaan informasi dan dokumentasi akan sangat membutuhkan inovasi dalam pelaksanaannya, misalnya secara sederhana penyediaan linktr.ee/bisip.kementan pada profil media sosial Instagram BISIP dan penyediaan [link g-drive](https://www.bisip.bsip.pertanian.go.id) untuk merekap daftar tamu yang berkunjung, ataupun pelayanan umum yang berhubungan dengan Tata Usaha dan survey kepuasan atas pelaksanaan pelayanan yang menggunakan QRCode. Selain juga ruang permohonan informasi yang disiapkan melalui link di website www.bisip.bsip.pertanian.go.id



Gambar 34. Layanan BISIP pada linktr.ee/bisip.kementan



Gambar 35. Ruang permohonan informasi di website www.bisip.bsip.pertanian.go.id

3.8. Hasil Tindak Lanjut Pengelolaan Informasi Publik BISIP

Dalam mengelola informasi publik yang dikuasai oleh BISIP sebagaimana UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka menjadi jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Selanjutnya sebagai perwujudan dari implementasi UU tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian. Seringkali bahwa kegiatan pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Dumas) juga masuk dalam mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi. Oleh karenanya pada operasionalnya di BISIP juga memberlakukan hal yang sama selain juga mengefektifkan Tim pelaksana baik PPID dan Tim Dumas ataupun Tim Pelayanan Terpadu. Hal ini memudahkan ketika dilakukan pelengkapan dokumen. Dan BISIP secara berkelanjutan melengkapi dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak yang tersedia di ruang PPID maupun bentuk digital yang di upload pada website BISIP dengan alamat ip <http://bisip.bsip.pertanian.go.id> dan portal PPID BISIP dengan alamat <https://bpatp-litbang-ppid.pertanian.go.id>.

Diperiode pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun 2024, Biro Humas dan Informasi Publik kembali menggelar periode penilaian dengan indikasi memberikan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian melalui kegiatan Anugerah dan Penghargaan KIP lingkup Kementerian Pertanian pada 6 Desember 2024.

Pada pemeringkatan informasi publik tahun 2024, BISIP memperoleh nilai 90 untuk peringkat ke-22 dan dikategorikan pada institusi yang informatif, meningkat dari penilaian tahun 2023. Tentunya hal ini menjadi pemacu peningkatan dalam inovasi pengelolaan PPID ke depan, terutama mendorong peningkatan peringkat yang lebih baik di tahun 2025 mendatang.

BAB IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi sepanjang dilaksanakan oleh Tim PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian di tahun 2024 terdapat beberapa kendala teknis dan non-teknis. Adapun kendala tersebut antara lain:

1. Introduksi dan pengenalan atas perubahan tugas dan fungsi dan juga nama Balai setelah bertransformasi menjadi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian perlu terus digaungkan termasuk atas adanya tugas dan fungsi serta tugas tambahan Bala. Perlunya terus dilakukan sosialisasi dan tidak bosan menyampaikan makna perubahan atas konsekuensi dan implementasi dari Undang-Undang dan regulasi yang sejalan;
2. Daftar Informasi Publik (DIP) yang ikut dilakukan pembaharuan sebagaimana dokumen dan informasi adalah materi utama dalam pengelolaan Pejabat PPID termasuk tata cara penyampaianya;
3. Keberlanjutan dalam peningkatan kapasitas SDM diinternal Balai termasuk menjadi unsur penting yang perlu dilakukan peningkatan secara terus menerus sejalan dengan berkembangnya improvisasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai;
4. Pemenuhan ketepatan waktu yang sangat berhubungan dengan instansi ataupun mitra *stakeholder* merupakan kendala yang wajar dalam proses transformasi organisasi dan masa peralihan perubahan;
5. Penguatan akan pemahaman mengimplementasikan SAQ dalam praktek Keterbukaan Informasi Publik menjadi hal yang penting dalam memperoleh penilaian kinerja KIP yang lebih baik di Balai.

BAB V. RENCANA TINDAK LANJUT

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) berkomitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik pada tahun-tahun yang akan datang, seiring dengan bertumbuhnya organisasi dan keterbukaan informasi merupakan mandat undang-undang yang akan terus terstruktur dalam pola pelayanan yang sejalan dengan tugas utama di BISIP terutama mendukung implementasinya menuju tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah, cepat, dan tepat sasaran.

Beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan ditahun 2025 seiring dengan transformasi yang masih akan berlangsung di Balai, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan SDM petugas layanan dan pengelola informasi dan dokumentasi sehingga dapat memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik dengan optimal;
2. Koordinasi yang lebih intensif guna memperkuat jejaring komunikasi dan koordinasi dan Pendampingan dan pembinaan oleh Tim PPID di lingkup BSIP dan/atau oleh PPID Utama di Sekretariat Jenderal menjadi bagian yang terus perlu dilakukan.
3. Revitalisasi Tim PPID dan ruang lingkup pelayanan di Balai, sehingga semua karyawan ikut berpartisipasi dalam menjaga integritas dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No 14 tahun 2008;
4. Mengoptimalkan portal PPID sebagai sarana digital yang mendukung penyimpanan dokumen dan informasi terkait dengan kinerja pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
5. Melakukan penyusunan daftar informasi yang dikecualikan, terlebih perubahan atas organisasi masih akan berlanjut di tahun 2025;
6. Mengintensifkan penggunaan inovasi sederhana termasuk menyederhanakan SOP dalam pelaksanaan layanan; dan
7. Mengubah citra Balai lama menjadi Balai baru yang informatif, baik untuk internal BSIP maupun untuk mitra stakeholder lain di luar BSIP.

BAB VI. PENUTUP

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) sebagai Balai baru yang mengemban tugas dan fungsi, serta tugas tambahan dalam memberikan pelayanan informasi dan pengelolaan hasil standar instrumen pertanian berpedoman pada Undang-Undang dan regulasi yang berlaku, dan tidak terkecuali pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Pada pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di tahun 2024 dilakukan dengan membentuk Tim PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) yang terdiri dari Tim Kepala Balai, Kepala Subag Tata Usaha dan Tim Kerja PHSIP. Penetapan kinerja Tim PPID Balai ditetapkan pada bulan Januari 2024 dan dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.

Kinerja pelayanan yang dilakukan di tahun 2024 merupakan cerminan dari mitigasi perubahan dan implementasi rencana aksi yang mendukung pola pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana ditetapkan di bulan November 2023, diantaranya:

1. Menyusun SK Penetapan Tim PPID;
2. Menyusun SK Penetapan Daftar Informasi Publik;
3. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung keterbukaan informasi dan pelayanan publik;
4. Menyusun rekapitulasi permohonan pelayanan informasi dan dokumentasi;
5. Menyusun motto pelayanan;
6. Menyusun kelengkapan informasi di website dan portal PPID;
7. Melakukan pengisian SAQ untuk kelengkapan penilaian implementasi Keterbukaan Informasi Publik; dan
8. Mengikuti kegiatan workshop, sosialisasi, dan lain-lain sebagaimana menjadi komitmen dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

Laporan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi tahun 2024 ini disusun sebagaimana pelaksanaan kegiatan mendukung keterbukaan informasi publik yang terlaksana di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian di tahun berjalan, sehingga dalam penilaian pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian diperoleh peringkat ke-22 untuk Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian dengan predikat Informatif dan nilai 90, nilai ini meningkat dari tahun 2023. Kiranya pemeringkatan selanjutnya di tahun 2025 dapat lebih baik seiring dengan pemahaman dan dukungan dari semua pihak di Balai yang makin membaik termasuk dalam mendukung pelaksanaan dan implementasi tugas dan fungsi Balai.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK PPID BISIP tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN SALAK NO 22 BOGOR 16151
TELEPON (025) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bisip.pertanian.go.id EMAIL: bisip.bisip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 14/KPTS/HM.130/H.1.1/01/2024

Tentang

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, perlu mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
 - b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud pada huruf (a) dan (b).
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
- g. Peraturan Menteri Pertanian 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);
- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- j. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- k. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
- n. Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

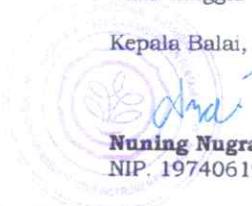
Menetapkan :

- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain:
- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
 - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan unit kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
 - c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - e. Menyiapkan dan Menyusun daftar informasi public;
 - f. Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Januari 2024

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, SPT., M.Si.
NIP. 197406192001122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR
 INSTRUMEN PERTANIAN
 NOMOR : 14/KPTS/HM.130/H.1.1/01/2024
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No	N a m a	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.	IV/a	Kepala Balai
2	Kania Tresnawati, S.TP.	III/d	Ketua Tim Kerja PHSIP
3	Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si.	IV/a	Kepala Subbagian Tata Usaha
4	Miyike Triana, SP.	IV/a	Pelaksana/Calon Pustakawan
5	Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum	III/c	Pelaksana/ Pustakawan Muda
6	Erwin Maulana, S. Kom.	III/a	Pelaksana/Pranata Komputer
7	Morina Pasaribu, SP., M.Si.	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
8	Okti A. Hapsari, SP., M.Si.	III/d	Pelaksana/Calon Pranata Humas
9	Faruk, SH.	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
10	Rani Fitria, S.E	IX	Pelaksana/Pranata Humas
11	Zazkia Amanda Azzahra, SE.Sy.	-	Pelaksana/Tenaga Honoror
12	Feri Tatilu	-	Pelaksana/Tenaga Honoror

Kepala Balai,

Nuning Nugrahani, S.Pt. M.Si
 NIP. 197406192001122001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151
TELEPON (025) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bsisp.pertanian.go.id EMAIL: bisip_bisip@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 23/KPTS/HM.130/H.1.1/02/2024

Tentang :
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya menetapkan daftar informasi publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Penetapan Informasi Publik untuk jenis informasi di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian dengan Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
10. Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/KPTS/HM.130/H.1.1/01/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Daftar Informasi Publik pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Kedua : Daftar Informasi Publik pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib disediakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi publik oleh pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik.
- Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 7 Februari 2024

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, S.Pt. M.Si
NIP. 197406192001122001



BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Nomor	: 01/2024
Tanggal efektif	: 11/01/2024
Tanggal revisi	: -
Revisi ke	: -
Halaman	: 1

No	Judul Informasi	Detail Informasi	Pejabat/Unit/Sektor yang Menguasai Informasi	Peranggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyempurnaan/Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi (Kode/klasifikasi)
						Cetak	Online		
A. Profil									
1	Alamat	Alamat BISIP, No, Telp, Website dan alamat email	BISIP	Ka Subbag Tata Usaha (TU)	Bogor, 2023			1 Tahun	BK
2	Sejarah BISIP	Sejarah berdirinya BISIP	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2023			1 Tahun	BK
3	Profil BISIP	Visi, Misi dan Tujuan	BISIP	Ka Subbag TU	Jakarta, 2023			1 Tahun	BK
4	Rencana Strategia	Rencana strategi BPATP 2020-2024; Draft Rencana BISIP ke 2 2022-2024	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024			1 Tahun	BK
5	Rencana Kerja Tahunan	Rencana kerja BPATP tahun 2020, 2021; BISIP 2023, 2024	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024			1 Tahun	BK
6	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi BISIP	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024			1 Tahun	BK
7	Profil Pejabat Struktural	Profil singkat Pejabat Struktural	BISIP	Pejabat PID dan Pengelola website	Bogor, 2024			1 Tahun	BK
8	Profil Unit Kerja	Ruang lingkup kegiatan unit kerja (SOP kegiatan)	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024			1 Tahun	BK
B. Program/Kegiatan									
1	DIPA	Daftar tahun periyelerigara anggaran; program dan kegiatan	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024			1 Tahun	BK
2	RKA-KL/Rencana Kerja	Daftar rincian rencana pelaksanaan anggaran kegiatan	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024			1 Tahun	BK
3	Perjanjian Kinerja	Perjanjian kontrak Kinerja BISIP dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024			1 Tahun	BK

N

No	Ringkasan Isi Informasi		Pembuat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Pertibahan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyempurnaan/Revisi Asip	Klasifikasi Informasi (Kode-Fikasi)
	Jenis Informasi	Detail Informasi				Cetak	Online		
4	JUPLAK/JUKNIS	Penyusunan Pelaksanaan dan Penyusunan Teknis Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK
C. Kinerja									
1	LAKIN/LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Berisi realisasi anggaran, pencapaian perjanjian kerja, kendala dan penyelesaiannya	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK
2	Laporan Tahunan	Laporan kegiatan unit kerja selama satu tahun mencakup seluruh kegiatan dan kondisi di unit kerja	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK
3	Daftar Kekayaan Intelektual	Daftar hasil inveni Badan Litbang Pertanian berupa paten, merek, cipat, dan hak pat	BISIP	Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	SS
4	Daftar Kerjasama Lisensi	Daftar perjanjian kerjasama lisensi antara Balai/Bagian dengan mitra lisensi	BISIP	Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	5 Tahun	SS
D. Keuangan									
1	Laporan Keuangan	Laporan realisasi anggaran, Neraca dan Catatan atau laporan keuangan	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK
2	Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara	Laporan hasil kekayaan pejabat negara	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK
E. Laporan Akses Informasi Publik									
1	Laporan PPI/D	Rekap PPI/D Tahunan	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK
2	Tata cara permohonan informasi publik	Tata cara permohonan informasi publik	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK

M

No	Ringkasan Isi Informasi		Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Perubahan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi (Kode/Basis)	
	Jenis Informasi	Detail Informasi				Cetak	Online			
3	Laporan Pengaduan Masyarakat	Rekap pengaduan masyarakat	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	BK	
4	Laporan Indeks Keputasan Masyarakat	Rekap undeks keputasan masyarakat	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	BK	
C. Peraturan										
	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP	Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	BISIP	Ka Subbag TU	Jakarta, 2023	✓	✓	1 Tahun	SS	
	Keputusan Menteri Pertanian No. 279 tahun 2023 tentang Kelompok Substansi 2 dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pertanian	Kelompok Kerja Hasil Standar Instrumen Pertanian	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Jakarta, 2023	✓	✓	1 Tahun	SS	
	Keputusan Menteri Pertanian No. 488 tahun 2023 tentang Kuasa Pendidikan Kekeayaan Intelektual dan Pendaftaran Varietas dan Pendaftaran Tanaman dan Penatakelolaan PNBSP Lingkup BSIP	Pendaftaran Kekeayaan Intelektual dan Pendaftaran Varietas Tanaman dan Penatakelolaan PNBSP Lingkup BSIP	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Jakarta, 2023	✓	✓	1 Tahun	SS	

N

No	Ringkasan Isi Informasi		Pegawai/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuat/Perubahan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi (Kodefikasi)
	Jenis Informasi	Detail Informasi				Cetak	Online		
	Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penguatan, Beraturan, Keperluan, Pengendalian, Gratifikasi, dan Pengendalian Pengelolaan Pengabdian Masyarakat Langkah Kementerian Pertanian	Perencanaan Beraturan Keperluan, Pengendalian, Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengabdian Masyarakat Langkah Kementerian Pertanian	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Jakarta, 2022	√	√	1 Tahun	SS
G. Informasi Tentang Organisasi									
	1. Tata cara permohonan informasi publik	Tata cara permohonan informasi publik	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK
	2. Pedoman Penanganan Pengabdian Masyarakat	Pedoman Penanganan Pengabdian Masyarakat	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK
H. Informasi Tentang Organisasi									
	1. SOP kegiatan BISIP	Standar Operasional Prosedur BISIP	BISIP	Ka Subbag TU, Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	SS
	2. Prosedur Permohonan Hak Cipta	Prosedur permohonan dan persyaratan pendafaran Hak Cipta	BISIP	Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK
	3. Prosedur Permohonan Paten	Prosedur permohonan dan persyaratan pendafaran Paten	BISIP	Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK
	4. Prosedur Permohonan Hak PVT	Prosedur permohonan dan persyaratan pendafaran Hak PVT	BISIP	Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK
	5. Prosedur Permohonan Pendaftaran Varietas Tanaman	Prosedur permohonan dan persyaratan pendafaran Varietas Tanaman	BISIP	Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Pertanian	Bogor, 2024	√	√	1 Tahun	BK

46

No	Ringkasan Isi Informasi		Pejabat/Unit/Satker yang Mengusai Informasi	Peninggihan/Pembuat/Perubahan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Asap	Klasifikasi Informasi (KodeRikasi)
	Jenis Informasi	Detail Informasi				Cetak	Online		
6	Prosedur Pemeliharaan dan perawatan kerjasama Lisensi	Prosedur pemeliharaan dan perawatan kerjasama lisensi	BISIP	Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Penilaian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	BK
7	Prosedur Pemanfaatan Hasil Standar	Prosedur Pemanfaatan Hasil Standar RSN	BISIP	Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Penilaian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	BK
8	Prosedur Informasi Pengelahan Hasil Standar	Prosedur Informasi Pengelahan Hasil Standar	BISIP	Tim Kerja Pengelola Hasil Standar Instrumen Penilaian	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	BK
1. Statistik									
3. Informasi Serta Merta									
1	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	SS
1	Jalur Evakuasi	Informasi jalur evakuasi ketika terjadi bencana	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	SM
2	Truk Kumpul	Informasi truk kumpul ketika terjadi bencana	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	SM
3	Backup Sistem Penyimpanan Informasi dan Data	Informasi backup sistem penyimpanan informasi dan data ke dalam NAS	BISIP	Ka Subbag TU	Bogor, 2024	✓	✓	1 Tahun	SM

Keterangan :

- BK : Berkala
- SS : Setiap Saat
- SM : Serta Merta
- DK : Dibencanakan

Bogor, 7 Februari 2024

Nuning Nugrahani, S.Pd., M.Si.
NIP 197406192001122001

Lampiran 3. SK Kepala BISIP No. 92 tentang Perubahan SK No. 14 tentang Pelaksana PPID BISIP tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151
TELEPON (025) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE (0251) 8382567
WEBSITE: www.bisip.bsip.pertanian.go.id EMAIL: bisip.bisip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : 92/KPTS/AM.130/A.1.1/4/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN NO. 14/KPTS/HM.130/H.1.1/01/2024 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian No. 14/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan adanya perubahan pejabat di lingkungan Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
 - bahwa Pegawai Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (BISIP) yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
- g. Peraturan Menteri Pertanian 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);
- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- j. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- k. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
- n. Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 117/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- o. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua :

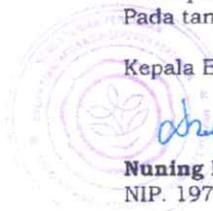
Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan unit kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;

- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
- e. Menyiapkan dan Menyusun daftar informasi public;
- f. Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana PPID Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.
- Keempat : Surat Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 14/KPTS/HM.130/H.I.1/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024 dicabut dan tidak berlaku.
- Kelima : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 8 April 2024



Kepala Balai,

Nuning Nugrahani, Spt., M.Si.
NIP. 197406192001122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR
 INSTRUMEN PERTANIAN
 NOMOR : 92/KPTS/AM.130/A.1.1/4/2024
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No	N a m a	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.	IV/b	Kepala Balai
2	Mulyawan, S.E.	III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha
3	Kania Tresnawati, S.TP.	III/d	Ketua Tim Kerja PHSIP
4	Miyike Triana, SP.	IV/a	Pelaksana/Calon Pustakawan
5	Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum	III/c	Pelaksana/ Pustakawan Muda
6	Erwin Maulana, S. Kom.	III/a	Pelaksana/Pranata Komputer
7	Morina Pasaribu, SP., M.Si.	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
8	Okti A. Hapsari, SP., M.Si.	III/d	Pelaksana/Calon Pranata Humas
9	Faruk, SH.	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
10	Rani Fitria, S.E	III/a	Pelaksana/Pranata Humas
11	Rini Rospiani Iswari	-	Pelaksana/Tenaga Honoror
12	Feri Tatilu	-	Pelaksana/Tenaga Honoror



Kepala Balai,

Nuning Nugrahani, S.Pt. M.Si
 NIP. 197406192001122001

Lampiran 4. Rincian Permohonan Informasi Tahun 2024

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi	Pengelolaan Informasi Publik		
JANUARI								
1	26 Januari 2024	Nama Pemohon	Husnain	GForm Layanan Informasi Website BISIP	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Dokumen Paten	Tindak lanjut Petugas	Mengirimkan Dokumen (Via WA)
		Usia*	50		Kategori Informasi*	Lainnya (Perlindungan KI)	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/ Instansi	PNS/ Kementan			Status	Selesai	
2	08 Januari 2024	Nama Pemohon	Randy Mardian K	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi	Tindak lanjut Petugas	Konsultasi
		Usia*	35		Kategori Informasi*	Keuangan	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/ Instansi	PNS			Status	Selesai	
3	18 Januari 2024	Nama Pemohon	Uka Kahfiana	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Keuangan	Tindak lanjut Petugas	Konsultasi
		Usia*	47		Kategori Informasi*	Keuangan	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/ Instansi	PNS			Status	Selesai	
4	18 Januari 2024	Nama Pemohon	david chrisnaldi	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Lisensi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Konsul
		Usia*	45		Kategori Informasi*	Lainnya (Lisensi)	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/ Instansi	Swasta			Status	Selesai	
FEBRUARI								
5	02 Februari 2024	Nama Pemohon	anita trias	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Data Statistik	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Data
		Usia*	27		Kategori Informasi*	Lainnya (Data Statistik)	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/ Instansi	PNS			Status	Selesai	
2	06 Februari 2024	Nama Pemohon	mufrida	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Humas dan Informasi Publik	Tindak lanjut Petugas	Mengirimkan data
		Usia*	35		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/ Instansi	PNS			Status	Selesai	
3	16 Februari 2024	Nama Pemohon	Ruslan	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Datang Langsung	Tindak lanjut Petugas	Konsultasi
		Usia*	40		Kategori Informasi*	Keuangan	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/ Instansi	PNS			Status	Selesai	
4	16 Februari 2024	Nama Pemohon	prayudi budi utomo	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (Perlindungan KI)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Konsul
		Usia*	50		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/ Instansi	PNS			Status	Selesai	
5	19 Februari 2024	Nama Pemohon	rezza putra pratama	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi Tata Usaha	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Data
		Usia*	29		Kategori Informasi*	Kepegawaian	Waktu Pelayanan	Baik Sekali

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
		Pekerjaan/Instansi	PNS				Status	Selesai
6	22 Februari 2024	Nama Pemohon	Amelia Nanda	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	penjajagan lokasi penelitian	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Data
		Usia*	22		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	PNS				Status	Selesai
7	01 Februari 2024	Nama Pemohon	Andrie Ayuni	Form Layanan Informasi Website	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Juknis, SOP, Kebijakan Tan Horti-Pisang	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Data
		Usia*	22		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	Umum				Status	Selesai
8	05 Februari 2024	Nama Pemohon	Evi Savitri	Form Layanan Informasi Website	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	informasi produk pestisida lisensi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Data
		Usia*	56		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
MARET								
1	1 Maret	Nama Pemohon	Ichwan Qodrian	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Layanan Kesehatan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan informasi
		Usia*	34		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta/ Caya Laboratorium				Status	Selesai
2	8 Maret	Nama Pemohon	Wiratno	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (Perlindungan KJ)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan informasi
		Usia*	60		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	ASN/BR/IN				Status	Selesai
3	20 Maret	Nama Pemohon	Irwan Arfiansyah	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Humas	Tindak lanjut Petugas	Konsultasi
		Usia*	47		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	ASN/PSI Tanaman Pangan				Status	Selesai
4	22 Maret	Nama Pemohon	Sarwendah Puji R	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (Kerjasama Lisensi)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Konsul
		Usia*	35		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta/PT. Pupuk Kujang				Status	Selesai
5	22 Maret	Nama Pemohon	Joko Pumomo	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (Kerjasama Lisensi)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Konsul
		Usia*	63		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	PNS/BPSI Tanah dan Pupuk				Status	Selesai
6	22 Maret	Nama Pemohon	Ema Lindawati	Datang Langsung	Informasi Publik yang	Pengelolaan Hasil Standardisasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Konsul

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Safuran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
		Usia*	Pekerjaan/Instansi		Dibutuhkan Pemohon	Instrumen Pertanian (Kerjasama Lisensi)	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Usia*	31		Kategori Informasi*	Lainnya	Status	Selesai
		Pekerjaan/Instansi	ASN/BPSI Tanah dan Pupuk					
7	26 Maret	Nama Pemohon	Erna Suryani	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (Perlindungan KI)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Konsul
		Usia*	55		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	PNS/BPSI Tanaman Hias				Status	Selesai
8	07 Maret	Nama Pemohon	Grasela Aprilla	Layanan Informasi Website	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Koleksi Repositori Perpustakaan BISIP	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Konsul
		Usia*	23		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo				Status	Selesai
APRIL								
1	1 April	Nama Pemohon	Angga Kusuma	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Bangunan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	35		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta/CV. Daya Prima Simetris				Status	Selesai
2	2 April	Nama Pemohon	Mulyawan	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Organisasi BISIP	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	48		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	ASN				Status	Selesai
3	2 April	Nama Pemohon	Akhmad Irfan Salim	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Bangunan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	22		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta/ CV. Jaluba Perkasa				Status	Selesai
4	4 April	Nama Pemohon	Muhamad Adrian Kamil	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (Kerjasama Lisensi)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	36		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	ASN/ Sekretariat BSIP				Status	Selesai
5	16 April	Nama Pemohon	Yadi Rusyadi	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Organisasi BISIP	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	54		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	ASN/BPSI TROA				Status	Selesai

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
6	19 April	Nama Pemohon	Roy Bahar	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Seragam Kantor	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	62		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta/CV. Bahar Master Tailor			Status	Selesai	
7	23 April	Nama Pemohon	Bayu Arta Ramadhan	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi kegiatan Organisasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	31		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	ASN/ PSI Peternakan dan Kesehatan Hewan			Status	Selesai	
8	25 April	Nama Pemohon	Gusmaini	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Paten	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	56		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	ASN/ BRIN			Status	Selesai	
9	26 April	Nama Pemohon	Ume Humaedah	Layanan Informasi Website	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	RSNI	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	41		Kategori Informasi*	Layanan Informasi Pertanian	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	ASN/ BBPSIP			Status	Selesai	
MEI								
1	2 Mei	Nama Pemohon	Dini Florina	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Hasil SIP (Mediasi Kerjasama)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	39		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	PNS/BPSITR OA			Status	Selesai	
2	3 Mei	Nama Pemohon	Haryono	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Lisensi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	65		Kategori Informasi*	Lisensi	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta/BINUS			Status	Selesai	
3	3 Mei	Nama Pemohon	Razidin Anwar	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Lisensi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	73		Kategori Informasi*	Lisensi	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta/ PT. Agro Zuriat Mandiri			Status	Selesai	
4	3 Mei	Nama Pemohon	Heru Munawar	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pemanfaatan dan Pengendalian Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (Kerjasama Lisensi)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	45		Kategori Informasi*	Lisensi	Waktu Pelayanan	Baik Sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta/PT Alam Semesta Agro			Status	Selesai	
5	13 Mei	Nama Pemohon	Henri	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Organisasi BISIP	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
		Usia*			Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
6	13 Mei	Nama Pemohon	Adit	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Organisasi BISIP	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	40		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
7	14 Mei	Nama Pemohon	Angga kusuma	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Organisasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	35		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
8	14 Mei	Nama Pemohon	Adriana sofyon	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Organisasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	32		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
9	15 Mei	Nama Pemohon	Nila Sauri	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Ketersediaan Ruang Rapat	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	42		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
10	15 Mei	Nama Pemohon	Nuril	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Kerjasama Lisensi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	37		Kategori Informasi*	Lisensi	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
11	15 Mei	Nama Pemohon	Ladiyani Retno Widowati	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian (Mediasi Kerjasama)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	55		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
12	22 Mei	Nama Pemohon	Rizky Fadhillah	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Kerjasama Lisensi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	37		Kategori Informasi*	Lisensi	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
13	29 Mei	Nama Pemohon	Othiel sinaga	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Ketersediaan Ruang Rapat	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	24		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
14	30 Mei	Nama Pemohon	Rizky Fadhillah	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi Kerjasama Lisensi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	37		Kategori Informasi*	Lisensi	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
15	08 Mei	Nama Pemohon	Siti Kuraesin	G Form Layanan Informasi	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Informasi Daftar Paten BBPSI Veteriner	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
		Usia*	49		Kategori Informasi*	Perlindungan KI	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	BBPSI Veteriner					
16	16 Mei	Nama Pemohon	Agus Kardinan	G Form Layanan Informasi	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi perlindungan KI Pestisida	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	67		Kategori Informasi*	Perlindungan KI	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	BRIN					
17	16 Mei	Nama Pemohon	Nur Azizah	G Form Layanan Informasi	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Konsultasi perlindungan KI Biogen	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	51		Kategori Informasi*	Perlindungan KI	Waktu Pelayanan Status	Baik Sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	BBPSI Biogen					
JUNI								
1	3 Juni	Nama Pemohon	Yadi Rusyadi	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Keuangan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	54		Kategori Informasi*	Keuangan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/BPSIT ROA					
2	3 Juni	Nama Pemohon	YB Kuncoro Eko	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Data keuangan dan pengadaan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	65		Kategori Informasi*	Keuangan dan Pengadaan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Inspektorat Jenderal					
3	3 Juni	Nama Pemohon	Ade Wahyu	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	42		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/BPSIT ROA					
4	3 Juni	Nama Pemohon	Windri Lestianto	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Data keuangan dan pengadaan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	42		Kategori Informasi*	Keuangan dan Pengadaan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Inspektorat Jenderal					
5	4 Juni	Nama Pemohon	Nugraha RS	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Data keuangan dan pengadaan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	54		Kategori Informasi*	Keuangan dan Pengadaan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Inspektorat Jenderal					
6	4 Juni	Nama Pemohon	Windri Lestianto	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Data keuangan dan pengadaan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	42		Kategori Informasi*	Keuangan dan Pengadaan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Inspektorat Jenderal					
7	5 Juni	Nama Pemohon	Windri Lestianto	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Data keuangan dan pengadaan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	42		Kategori Informasi*	Keuangan dan Pengadaan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Inspektorat Jenderal					
8	6 Juni	Nama Pemohon	Windri Lestianto	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Data keuangan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
						dan pengadaan		
		Usia*	42		Kategori Informasi*	Keuangan dan Pengadaan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
9	6 Juni	Nama Pemohon	Yadi Rusyadi	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Keuangan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	54		Kategori Informasi*	Keuangan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Inspektorat Jenderal					
10	7 Juni	Nama Pemohon	Windri Lestianto	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Data keuangan dan pengadaan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	42		Kategori Informasi*	Keuangan dan Pengadaan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/BPSIT ROA					
10	7 Juni	Nama Pemohon	Nugraha RS	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Data keuangan dan pengadaan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	54		Kategori Informasi*	Keuangan dan Pengadaan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Inspektorat Jenderal					
11	10 Juni	Nama Pemohon	Windri Lestianto	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Data keuangan dan pengadaan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	42		Kategori Informasi*	Keuangan dan Pengadaan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Inspektorat Jenderal					
12	10 Juni	Nama Pemohon	YB KUncoro Eko P	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Data keuangan dan pengadaan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	65		Kategori Informasi*	Keuangan dan Pengadaan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Inspektorat Jenderal					
13	19 Juni	Nama Pemohon	Hafizd	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	40		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	Swasta					
14	20 Juni	Nama Pemohon	Gymnastiar Rizky Ramadhan	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	21		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	Swasta					
15	21 Juni	Nama Pemohon	Muhamad Andrian Kamil	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	36		Kategori Informasi*	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Sekretariat BSIP					
16	27 Juni	Nama Pemohon	Herdina Pratiwi	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pemanfaatan dan Pengendalian Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (Kerjasama Lisensi)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	44		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
		Pekerjaan/Instansi	PNS/BPSIT ROA		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	Status	Selesai
17	28 Juni	Nama Pemohon	Sepdrian DP	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	30		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	PNS/PSIPK H				Status	Selesai
18	28 Juni	Nama Pemohon	Nita Sari	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	29		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Sekretariat BSIP				Status	Selesai
19	28 Juni	Nama Pemohon	Nita Sari	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	29		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Sekretariat BSIP				Status	Selesai
20	06 Juni	Nama Pemohon	Ume Humaedah	G Form Layanan Informasi	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Informasi ATB kementan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	41		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Sekretariat BSIP				Status	Selesai
JULI								
1	2 Juli	Nama Pemohon	Sofyan Soleh	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	56		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	PNS/BSIP				Status	Selesai
2	3 Juli	Nama Pemohon	Imam Prasetyo	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	57		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	PNS/Biro Humas dan IP Setjen				Status	Selesai
3	4 Juli	Nama Pemohon	Widagdo	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	54		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai
4	5 Juli	Nama Pemohon	Widagdo	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	54		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai
5	12 Juli	Nama Pemohon	Mohammad Rifqi Rabbani	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	27		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai
6	16 Juli	Nama Pemohon	Fajar j	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	31		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai
7	22 Juli	Nama Pemohon	Angga Kusuma	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	36		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai
8	22 Juli	Nama Pemohon	Ade Wahyudin	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
		Usia*	Pekerjaan/Instansi		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
9	23 Juli	Nama Pemohon	Novianto	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	50		Kategori Informasi*	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
10	24 Juli	Nama Pemohon	Josef Septardi	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	52		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
11	29 Juli	Nama Pemohon	Rachma	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	41		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
12	08 Juli	Nama Pemohon	Khairunnisa	G Form Layanan Informasi	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Deksripsi ATB Kementan (PVT)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	22		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
13	12 Juli	Nama Pemohon	Nadrah Uifa	G Form Layanan Informasi	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Informasi ATB Kementan (Merk Valia)	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	27		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
AGUSTUS								
1	12 Agustus	Nama Pemohon	Rama	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	32		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
2	12 Agustus	Nama Pemohon	Hedi	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	45		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
3	16 Agustus	Nama Pemohon	Widagdo	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	54		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
4	22 Agustus	Nama Pemohon	Meriyani	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	39		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
5	22 Agustus	Nama Pemohon	Adhityo	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	42		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
6	27 Agustus	Nama Pemohon	Faradila	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	32		Kategori Informasi*	GEF	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
7	26 Agustus	Nama Pemohon	Ani Widarti	G Form Layanan Informasi	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	40		Kategori Informasi*	Perlindungan KI dan Lisensi	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
SEPTEMBER								
1	19-Sep	Nama Pemohon	Slamet Sutriswanto	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	38		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
2	19-Sep	Nama Pemohon	Farizki Wdiansyah	Datang Langsung	Informasi Publik yang	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Pekerjaan/Instansi	ASN/Pustaka					

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
		Usia*	30		Dibutuhkan Pemohon			
		Pekerjaan/Instansi	ASN/Pustak		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
3	19-Sep	Nama Pemohon	Wage Ratna Rohaeni	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	41		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	ASN/BBPSI PADI					
4	19-Sep	Nama Pemohon	Hera Nurhayati	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	50		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	ASN/PSI Perkebunan					
5	19-Sep	Nama Pemohon	Anwar pasanbu	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	40		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	ASN/PSI Perkebunan					
6	19-Sep	Nama Pemohon	Randy	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	38		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	ASN/BIOGE N					
7	19-Sep	Nama Pemohon	Danita Dwi S	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	38		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	ASN/BBPSI Veteriner					
8	20-Sep	Nama Pemohon	Ahmad	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	42		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	Swasta					
9	24-Sep	Nama Pemohon	Mohammad Rifqi Rabbani	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	38		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	Swasta					
10	24-Sep	Nama Pemohon	Wendy	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	35		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	BUMN/BPJS					
11	27-Sep	Nama Pemohon	Dewi patupi	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	45		Kategori Informasi*	Perjanjian Lisensi	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	Swasta					
12	27-Sep	Nama Pemohon	Shafia Adzandien	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
		Usia*			Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
OKTOBER								
1	02/10/2024	Nama Pemohon	Yantho Sudrajat	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	48		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	ASN/Dirjen Hortikultura					
2	04/10/2024	Nama Pemohon	Rizqi Nur Ramadhon	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Koordinasi Kekayaan Intelektual	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	43		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	ASN/Biro Hukum Kementan					
3	04/10/2024	Nama Pemohon	Adhityo Priyambodo	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	43		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	Swasta					
4	08/10/2024	Nama Pemohon	Haryono Saputra	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Mediasi Kerjasama	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	28		Kategori Informasi*	Lisensi	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	Swasta					
5	08/10/2024	Nama Pemohon	Mustofa	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	32		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	ASN/Irjen					
6	09/10/2024	Nama Pemohon	Sepdrian Dwikirana Putra	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Koordinasi TI	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	31		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	ASN/PSIPK H					
7	11/10/2024	Nama Pemohon	Josef	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Koordinasi ISO	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	53		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	Swasta					
8	21/10/2024	Nama Pemohon	Adrian	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	33		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	Swasta					
9	21/10/2024	Nama Pemohon	Hendri	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	41		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	Swasta					
10	24/10/2024	Nama Pemohon	Yadi Supriyadi	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Administrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	46		Kategori Informasi*	Lisensi	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	ASN/ BPSI UAT					
NOVEMBER								
1	1 November	Nama Pemohon	Widagdo	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pengadaan Barang dan Jasa	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	57		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan Status	Baik sekali Selesai
		Pekerjaan/Instansi	Swasta					
2	1 November	Nama Pemohon	Soepriati	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pengadaan Barang dan Jasa	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
		Usia*			Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik sekali
3	1 November	Pekerjaan/Instansi	Swasta	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Nama Pemohon	Akber Maulad		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Usia*	37		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Pekerjaan/Instansi	ASN/Badan Pangan Nasional		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
4	1 November	Pekerjaan/Instansi	Swasta	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Nama Pemohon	Memet Hariyanto		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Usia*	57		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Pekerjaan/Instansi	ASN/Biro Hukum Kementan		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
5	1 November	Pekerjaan/Instansi	Swasta	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Nama Pemohon	Hendri		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Usia*	41		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Pekerjaan/Instansi	Swasta		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
6	4 November	Pekerjaan/Instansi	Swasta	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Nama Pemohon	Nikhham Aditya		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Usia*	28		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Pekerjaan/Instansi	Swasta		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
7	4 November	Pekerjaan/Instansi	Swasta	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Nama Pemohon	Ony Budi Prasetyo		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Usia*	51		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Pekerjaan/Instansi	Swasta		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
8	4 November	Pekerjaan/Instansi	Swasta	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Kerjasama Lisensi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Nama Pemohon	Iin Dwi S		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Usia*	39		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Kerjasama Lisensi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Pekerjaan/Instansi	ASN/BPSI Tanah dan Pupuk		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
9	6 November	Pekerjaan/Instansi	Swasta	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Nama Pemohon	Aji		Kategori Informasi*	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Usia*	42		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Pekerjaan/Instansi	ASN/Biro Hukum Kementan		Kategori Informasi*	Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Pelayanan	Baik sekali
10	8 November	Pekerjaan/Instansi	Swasta	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Nama Pemohon	Santosa		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Usia*	52		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Pekerjaan/Instansi	ASN/Sekretariat BSIP		Kategori Informasi*	Lainnya	Waktu Pelayanan	Baik sekali
11	14 November	Pekerjaan/Instansi	Swasta	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pengadaan Barang dan Jasa	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Nama Pemohon	Adriana Sofyan		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Usia*	33		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Pengadaan Barang dan Jasa	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Pekerjaan/Instansi	Swasta		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik sekali
DESEMBER								
1	2 Desember	Pekerjaan/Instansi	Swasta	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Nama Pemohon	Angga		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Usia*	43		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
2	2 Desember	Pekerjaan/Instansi	Swasta	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Nama Pemohon	Slamet Widayati		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Usia*	43		Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi

No	Tanggal Permohonan	Identitas Pemohon		Saluran Permohonan	Keragaan Informasi		Pengelolaan Informasi Publik	
		Usia*	48		Kategori Informasi*	Pengadaan Barang dan Jasa	Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai
3	2 Desember	Nama Pemohon	Rachma	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	41				Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai
4	3 Desember	Nama Pemohon	Adhityo Priyambodo	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	42				Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta				Status	Selesai
5	13 Desember	Nama Pemohon	Erik Kumiawan	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	48				Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	ASN			Lainnya	Status	Selesai
6	13 Desember	Nama Pemohon	Juniawati	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	43				Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	ASN			Lainnya	Status	Selesai
7	13 Desember	Nama Pemohon	Ismeth Inounu	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	70				Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	ASN			Lainnya	Status	Selesai
8	17 Desember	Nama Pemohon	Adriana Sofyan	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	33				Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta			Pengadaan Barang dan Jasa	Status	Selesai
9	17 Desember	Nama Pemohon	Slamet Widayati	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	48				Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta			Pengadaan Barang dan Jasa	Status	Selesai
10	19 Desember	Nama Pemohon	Hendri	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	41				Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta			Lainnya	Status	Selesai
11	20 Desember	Nama Pemohon	Josef	Datang Langsung	Informasi Publik yang Dibutuhkan Pemohon	Adminstrasi	Tindak lanjut Petugas	Memberikan Informasi
		Usia*	53				Waktu Pelayanan	Baik sekali
		Pekerjaan/Instansi	Swasta			Lainnya	Status	Selesai

Lampiran 5. E-Money KIP BISIP 2024

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis

Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian

Rekap Penilaian:

Nilai SAQ	Nilai Web	Nilai Tahap I	Nilai Wawancara pimpinan	Nilai Inovasi pelayanan Informasi	Nilai Validasi	Nilai Tahap II	Total
81	88	90	87,31	87	100	98,486	89,3844
Hasil Nilai SAQ		Hasil Nilai Web					